



MEMBERSAMAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



LAPORAN TAHUNAN **2023**



LAPORAN TAHUNAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2023

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210 Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id

Cetakan pertama: Januari 2024

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**Ketentuan Pidana****Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Akses Informasi



Website:

www.bpk.go.id

wartapemeriksa.bpk.go.id

jdih.bpk.go.id

jurnal.bpk.go.id

badiklatpkn.bpk.go.id



E-mail: eppid@bpk.go.id

Sosial Media:



twitter : @bpkri



instagram : @bpkriofficial



facebook : @humasbpkri.official



youtube : BPK RI Official



whatsapp : +62 8111 90 7010



Tiktok : @bpk.ri



Alamat Surat:

PO BOX 4330 Jakarta 10043



Alamat Kantor Pusat:

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 31 Jakarta Pusat 10210



Telp: +6221 255 49000



Faks: +6221 5795 0288



Sekapur Sirih

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia pada Rabu (21/06/2023). Dalam pengumuman yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden pun menyatakan bahwa dengan pencabutan tersebut, maka Indonesia memasuki masa endemi.

Pencabutan status itu memiliki makna yang penting setelah tiga tahun lebih seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19. Pencabutan itu juga menjadi momentum bagi seluruh elemen di Indonesia untuk dapat meningkatkan geliat perekonomian di Tanah Air. Dengan begitu, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, momentum ini menjadi pengingat bahwa dalam kondisi apapun, tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus tetap dapat dijalankan dengan baik. Jika dalam kondisi pandemi mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka dalam kondisi yang lebih baik, fungsi pemeriksaan BPK seharusnya memberikan dampak yang lebih baik lagi.

Tentunya, kinerja BPK saat ini tidak lepas dari pengalaman yang telah dipupuk selama 78 tahun sejak pertama kali berdiri. Dengan berbekal pengalaman dan harapan akan kehidupan masyarakat yang lebih baik, BPK pun terus berkembang dalam menjalankan tiga peran penting, yaitu *oversight, insight, dan foresight*, bagi pemerintah.

Pada tahun ini, BPK terus memberikan hasil nyata terhadap upaya pembangunan bangsa yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Sebagai gambaran, BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp132,69 triliun. Rp19,20 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023. Hasil ini berasal dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK sejak 2005 hingga semester I 2023.

Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023. Dalam laporan itu disampaikan bahwa penyelamatan tersebut berupa penyerahan aset dan/penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Selama periode itu juga, kepatuhan kementerian/ lembaga (K/L) atas rekomendasi BPK tercatat sudah mencapai lebih dari 50 persen atau mencapai 76,9 persen. Meskipun begitu, BPK menyoroti kepatuhan pemerintah yang masih rendah atas hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga semester I 2023, yang baru 47 persen.

Untuk itu, BPK pun mengingatkan bahwa optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan. Khususnya bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*.

"Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

“

Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Capaian Internasional

Tahun 2023 juga menjadi momentum yang istimewa bagi BPK karena ditandai dengan capaian kapasitas kelembagaan dalam dunia internasional. Misalnya saja masih dipercayanya BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk beberapa lembaga internasional, terutama yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, BPK juga memimpin Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2022-2023 pada November lalu.

Beberapa lembaga yang mempercayai BPK menjadi pemeriksa eksternal mereka antara lain Inter-Parliamentary Union untuk periode 2023-2025. Kemudian World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029.

Pada 1 Desember 2023 dalam sidang International Maritime Organization (IMO), BPK juga kembali terpilih sebagai pemeriksa eksternal untuk lembaga ini. Termasuk World Maritime University dan International Maritime Law Institute untuk periode 2024-2027.

Pada tahun ini, BPK juga terpilih sebagai tuan rumah International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) ke-26. Kemudian pada 2028 nanti BPK akan menjadi ketua organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028-2031. Pencapaian lain adalah BPK terpilih menjadi sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024-2029. Torehan prestasi ini menjadi salah satu wujud dari fungsi, dedikasi, serta sinergi BPK dengan para pemangku kepentingan.

BPK Dukung SDGs

BPK juga percaya bahwa sebagai bagian dari komunitas global, lembaga pemeriksa dunia atau *supreme audit institutions* (SAI) dapat berperan penting dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini, antara lain, dilakukan melalui audit program yang relevan dan sesuai dengan mandat pemerintah yang didasari oleh empat pendekatan INTOSAI yang tertuang di dalam INCOSAI XXII.

Bentuk upaya dukungan BPK atas tercapainya agenda SDGs 2030 antara lain pelatihan berjudul "Training on Auditing SDGs: Energy Transition As Part of Green Economy". Ini merupakan kegiatan yang dijalankan BPK bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemeriksa Keuangan Negara BPK Bali dan didukung oleh INTOSAI Working Group on Environmental Audit. Landasan agenda ini antara lain pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau (*green economy*) yang sangat penting untuk pelestarian lingkungan. Pergeseran paradigma ini juga penting sebagai kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian memberikan keamanan energi dan menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.

Terkait hal itu, SAI juga dapat berperan dalam mempromosikan ekonomi hijau. Misalnya dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif di seluruh inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan. SAI juga dapat mengukur kinerja dan hasil program dan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau. Kemudian, menilai apakah inisiatif tersebut

mencapai tujuan lingkungan dan ekonominya. Setelah itu, melaporkan temuan serta membuat rekomendasi kepada lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan agar dapat meningkatkan desain serta implementasi lingkungan hidup dan keberlanjutan program.

Akuntabilitas Sebagai Pondasi Utama

Dalam setiap langkah, BPK juga tidak pernah melupakan akan pentingnya akuntabilitas. Karena, dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas adalah salah satu pondasi utama, termasuk di dalamnya adalah akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Penerapan *good governance* dalam siklus anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan dan belanja pemerintah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, juga telah diaudit oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Berdasarkan proses kerja yang umum, anggaran pemerintah yang akuntabel adalah mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sambil kemudian meneguhkan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan keuangan pemerintah.

Melalui anggaran yang akuntabel, maka pemerintah turut memperkuat demokrasi dan memupuk kepercayaan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara. Ini kemudian mengapa BPK harus terus konsisten menegakkan prinsip, aturan, dan pedoman pengelolaan anggaran yang baik.

Apalagi, kebijakan pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan fungsi pemeriksaan eksternal dalam siklus penganggaran menunjukkan pergeseran fokus akuntabilitas anggaran. Kini, BPK tidak hanya sekadar menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, lebih dari itu, yakni bagaimana belanja yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat berdampak terhadap tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan itu, BPK pun terus meningkatkan profesionalisme pemeriksa di lingkup sektor publik. Karena ini merupakan hal yang fundamental dan krusial, terutama di era reformasi manajemen keuangan publik atau *public finance management* (PFM) pada saat ini.

Bisa dikatakan, komitmen profesionalisme merupakan langkah utama untuk meraih kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Tentunya dengan diiringi harapan agar para pemeriksa senantiasa melayani kepentingan publik dan menghormati kepercayaan yang telah diamanatkan. Sejalan dengan hal itu, BPK telah mengatur secara tegas dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK menyelenggarakan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara yang dikenal dengan Certified State Finance Auditor (CSFA).

Berbagai upaya peningkatan profesionalisme yang dilakukan BPK pun telah membawa capaian yang patut diapresiasi dan memberikan warna tersendiri dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Capaian tersebut antara lain, BPK meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Tentunya, upaya peningkatan kelembagaan ini diharapkan dapat sejalan dengan visi BPK, yakni pemeriksaan BPK harus memberikan dampak perbaikan kualitas tata kelola keuangan negara dan konstruktif dalam pencapaian tujuan bernegara.

Ikhtisar Kejadian Penting

Januari



- BPK melakukan serah terima Presidensi Supreme Audit Institution 20 (SAI20) kepada SAI India.
- BPK dan NAD Malaysia melanjutkan kerja sama bilateral di bidang pemeriksaan sektor publik.

Februari

- BPK melakukan seleksi tahap akhir sebagai kandidat terpilih pemeriksa eksternal Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029 di kantor pusat WIPO di Jenewa, Swiss.
- BPK dan SAI Jerman memperkuat sinergi dan kerja sama bilateral.

Maret



- Pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK dari unsur profesi di kantor pusat BPK, Jakarta.
- Wakil Ketua BPK menjadi pembicara dalam kegiatan International Meeting of Performance Audit Critical Thinkers (IMPACT) 2023, di Canberra, Australia.

April

- BPK memenuhi undangan SAI India untuk menghadiri Senior Official Meeting (SOM) SAI20 di Kota Guwahati, Assam, India.
- BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) melakukan *joint peer review* untuk Mongolia National Audit Office (MNAO).
- BPK memulai proses pemeriksaan keuangan dan kinerja atas International Maritime Organization (IMO).
- BPK berpartisipasi dalam kegiatan 10th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) yang digelar United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).
- Wakil Ketua BPK menghadiri pertemuan INTOSAI Development Initiative (IDI) Board di Pretoria, Afrika Selatan.

- BPK dan NAA Kamboja memperkuat kerja sama bilateral melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi.
- Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke berbagai pemerintah daerah.



Mei

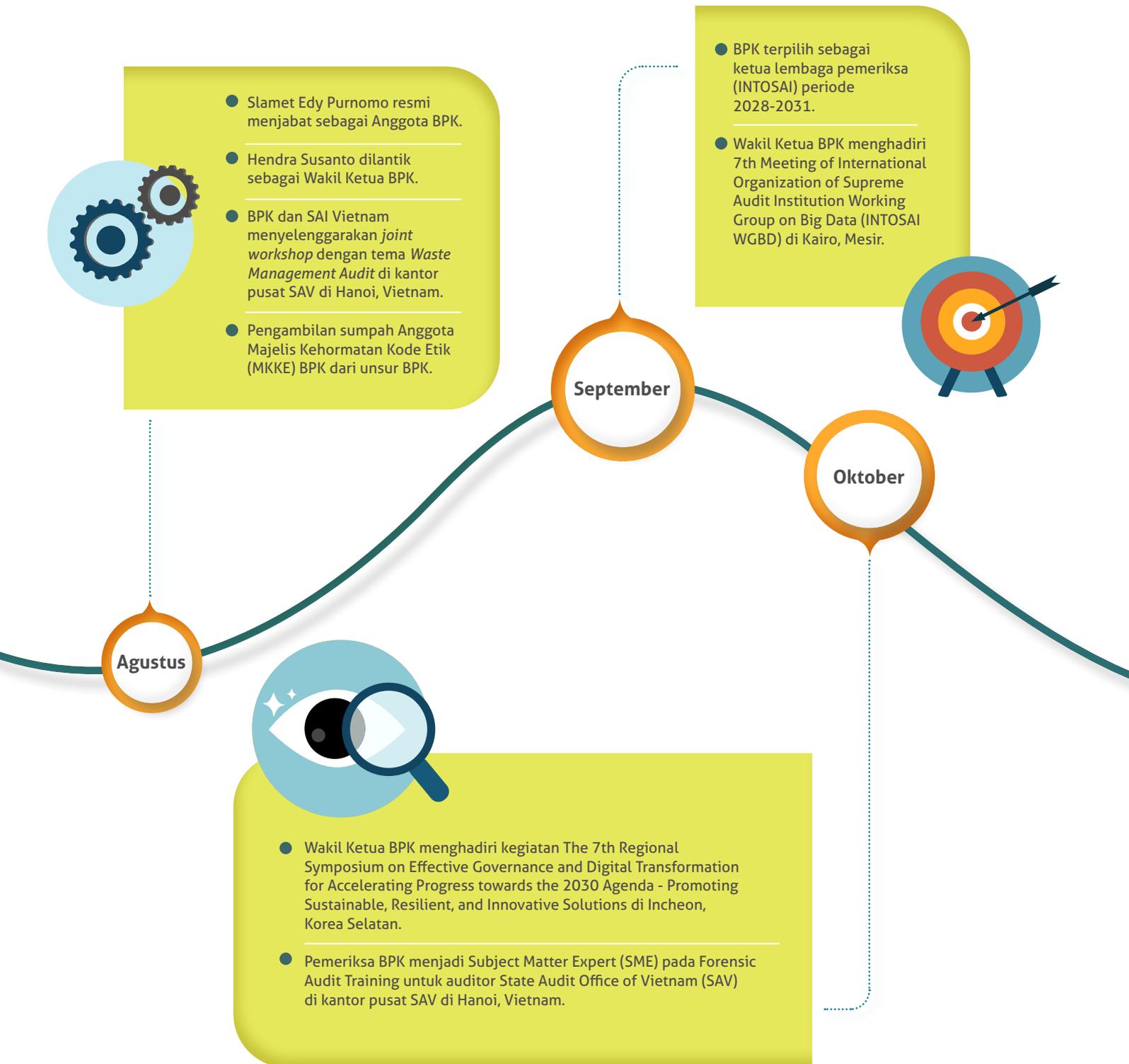
- Ketua BPK memimpin pertemuan ke-48 ASEAN Audit Committee (AAC).
- Ketua BPK tekankan peran penting SAI dalam capaian SDGs di pertemuan tingkat tinggi SDGs di Markas Besar PBB, New York.
- Wakil Ketua BPK menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023 di Markas Besar PBB, New York.
- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2020-2023.
- Ketua BPK menekankan pentingnya peran SAI dalam mendorong tata kelola industri ekstraktif pada pertemuan 5th meeting of the INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI), di Jakarta.

Juni

- BPK menggelar seminar internasional mengenai ekonomi hijau yang diikuti delegasi SAI dari berbagai negara.
- BPK dan ANAO tingkatkan kualitas pemeriksaan kinerja melalui *Senior Management Dialogue*.
- BPK dan SAI India melakukan penguatan kerja sama bilateral melalui penandatanganan MoU.
- Ketua BPK menghadiri SAI20 Summit di Kota Panjim, Goa, India.
- Wakil Ketua BPK menyerahkan *long-form audit report* atas Universitas Maritim Dunia atau World Maritime University (WMU) dalam sidang Board of Governors WMU di Malmö, Swedia.
- Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2022 dan IHPS II tahun 2022 kepada DPR, DPD, dan Presiden RI.



Juli



- BPK dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (ASEANSAI) periode 2024–2029.
- BPK berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan SAI Arab Saudi mengenai pemeriksaan kinerja.
- Ketua BPK menyampaikan hasil pertemuan panel auditor eksternal PBB kepada Sekjen PBB di Markas Besar PBB, New York, AS.
- BPK mengadakan pelatihan pemeriksaan SDGs bertajuk “Training on Auditing SDGs: Energy Transition As Part of Green Economy”.
- BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023–2025.



November

Desember

- BPK ditunjuk kembali menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) 2024-2027.
- BPK memaparkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja IMO tahun 2021 dan 2022 dalam Sidang Majelis IMO di kantor pusat IMO di London, Inggris.
- Penyerahan IHPS I 2023 kepada DPR, DPD, dan Presiden RI.



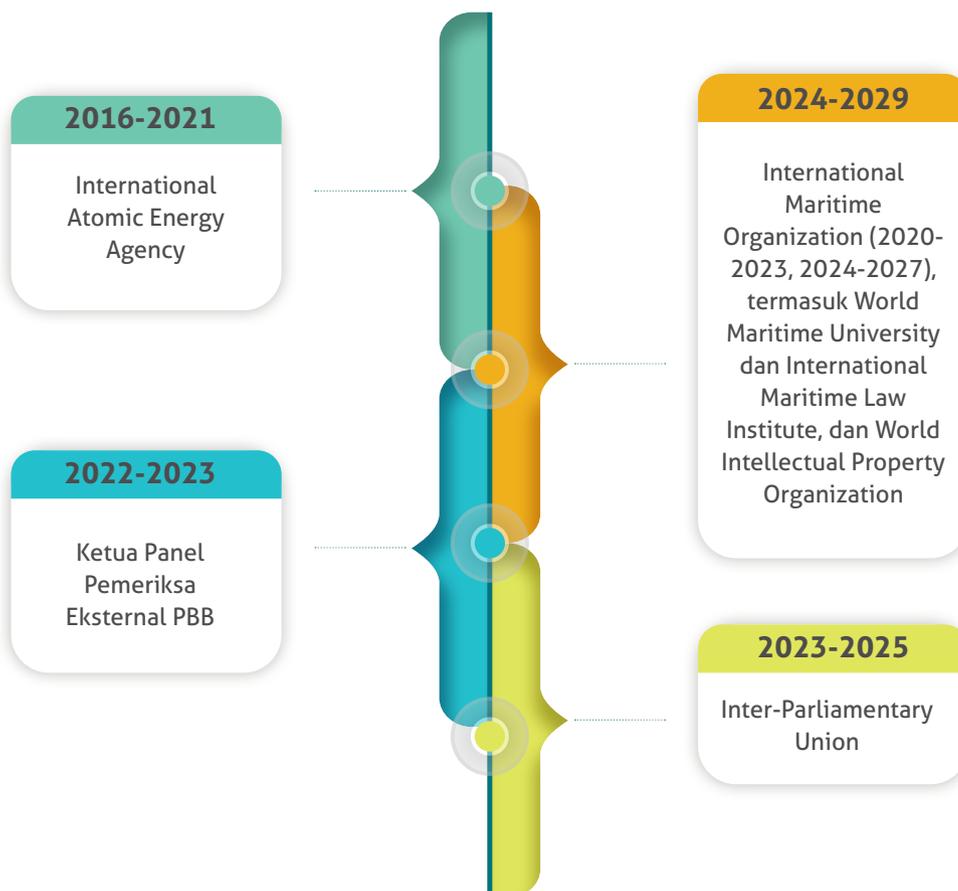


Semakin Diakui Dunia

Kapasitas BPK sebagai lembaga pemeriksa semakin diakui di dunia internasional. Pada 2023, BPK kembali meraih kepercayaan untuk menjadi pemeriksa eksternal organisasi internasional.

Pada November 2023, BPK terpilih menjadi pemeriksa pada Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) periode 2023-2025. Adapun pada awal Desember, BPK ditunjuk kembali menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO) periode 2024-2027, setelah pada 2020-2023 BPK mampu menunjukkan kinerja positif sebagai pemeriksa eksternal IMO.

Sepak Terjang BPK sebagai Pemeriksa Eksternal



Mendukung Pencapaian Tujuan Negara

BPK memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada periode semester II 2022 hingga semester I 2023, BPK menyelesaikan 1.093 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berisikan 12.751 temuan dan 36.389 rekomendasi.

Kerja keras BPK dalam mengawal keuangan negara telah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan di tingkat pusat dan daerah yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan itu tak terlepas dari peran dan kontribusi Kantor BPK Perwakilan di seluruh provinsi.

Persentase capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mencapai 91 persen pada 2022. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan capaian opini WTP pada 2018 yang sebesar 82 persen. Capaian opini WTP bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), khususnya untuk tingkat provinsi dan kabupaten.

Daftar Isi

▼	18	▼
Bagian 1		
Kinerja BPK Tahun 2023		60
▼	72	▼
Bagian 2		Bagian 2
Mengawal SDGs		
▼	94	▼
Bagian 3		Bagian 4
Profil BPK		Tantangan BPK Ke Depan



BAGIAN 1

Kinerja BPK Tahun 2023





Penyelamatan Keuangan Negara Berdasarkan Data IHPS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester I tahun 2023 sebesar **Rp132,69 triliun**, di mana **Rp19,20 triliun** mencakup hasil pemeriksaan RPJMN 2020-semester I 2023

Tahun	Nilai Penyerahan aset/penyetoran ke kas negara menindaklanjuti Rekomendasi BPK Akumulasi dari periode 2005-Semester I 2023
2005-2009	
2005	4.151.410
2006	2.584.769
2007	9.640.401
2008	24.255.194
2009	6.997.118
Sub Jumlah 2005-2009	47.628.892,44
2010-2014	
2010	4.472.317
2011	4.086.268
2012	3.864.153
2013	3.992.865
2014	15.667.507
Sub Jumlah 2010-2014	32.083.109,86

Tahun	Nilai Penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara menindaklanjuti Rekomendasi BPK Akumulasi dari periode 2005-Semester I 2023
2015-2019	
2015	4.342.288
2016	5.346.975
2017	8.798.084
2018	8.775.831
2019	6.516.825
Sub Jumlah 2015-2019	33.780.002
2020-Semester I 2023	
2020	6.988.790
2021	6.259.821
2022	4.606.339
Sem I 2023	1.345.565
Sub Jumlah 2020-Sem I 2023	19.200.515,43
JUMLAH	132.692.520,14



Kinerja Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Setiap tahun, ribuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasinya dikeluarkan BPK.

BPK juga terus mengawal rekomendasi dari setiap pemeriksaan yang diberikan kepada entitas. Berbagai upaya BPK ini mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan entitas.

Hal tersebut tecermin dari capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain memeriksa laporan keuangan, BPK setiap tahun juga mengawal program-program yang dijalankan entitas melalui pemeriksaan kinerja hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil Pemeriksaan Semesteran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II setiap tahun anggaran. IHPS tersebut menjadi bahan dasar penyusunan laporan tahunan BPK. Laporan Tahunan 2023 memuat hal-hal dan data yang dianggap penting dan signifikan, yang tersaji dalam IHPS II 2022 dan IHPS I 2023.

Informasi lebih lengkap mengenai IHPS dapat diakses melalui link <https://www.bpk.go.id/ihps>



Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 dan Semester I 2023



Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif



Ringkasan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Pengelola Anggaran

Pengelola Anggaran: Pemerintah Pusat

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan:	134	1.291	3.512
Pemeriksaan Kinerja:	2	32	58
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan:	37	396	1.173
Total:	173	1.719	4.743

Pengelola Anggaran: Pemerintah Daerah

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan:	544	7.700	21.987
Pemeriksaan Kinerja:	65	564	1.812
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan:	150	1.249	3.383
Total:	759	9.513	27.182

Pengelola Anggaran: BUMN dan Badan Lainnya

Jenis Pemeriksaan,	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan:	4	31	75
Pemeriksaan Kinerja:	2	21	58
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan:	32	338	892
Total:	38	390	1.025

Pemeriksaan PN 5 dan PN 7

Jenis Pemeriksaan,	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemeriksaan Kinerja	110	978	3.043
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	13	151	396
Total:	123	1.129	3.439

Sumber: IHPS II 2022 dan IHPS I 2023

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif

Nilai Total

Temuan, Permasalahan, dan Rekomendasi

IHPS II Tahun 2022 dan IHPS I Tahun 2023 mengungkap 12.751 temuan yang terdiri atas **20.955 permasalahan**



Rekomendasi berupa penyetoran uang/ penyerahan aset.

Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar

Rp1,43 triliun

Nilai Total Temuan:

Rp44,04 triliun

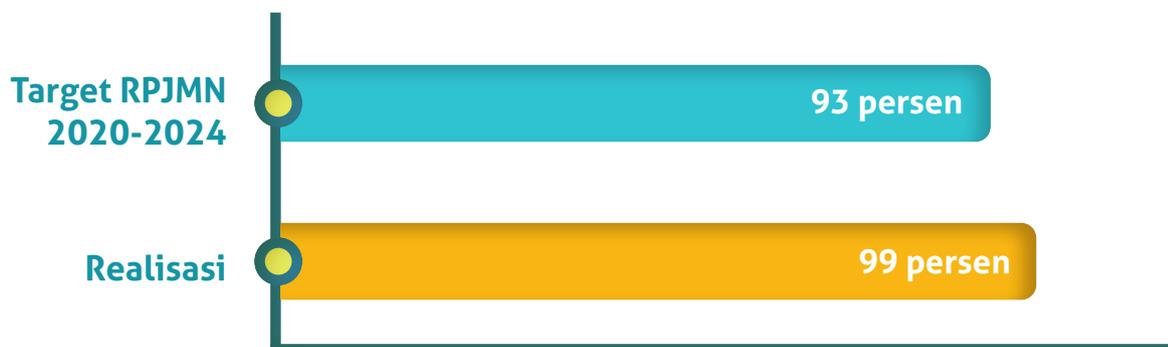


Jumlah tersebut di atas tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.



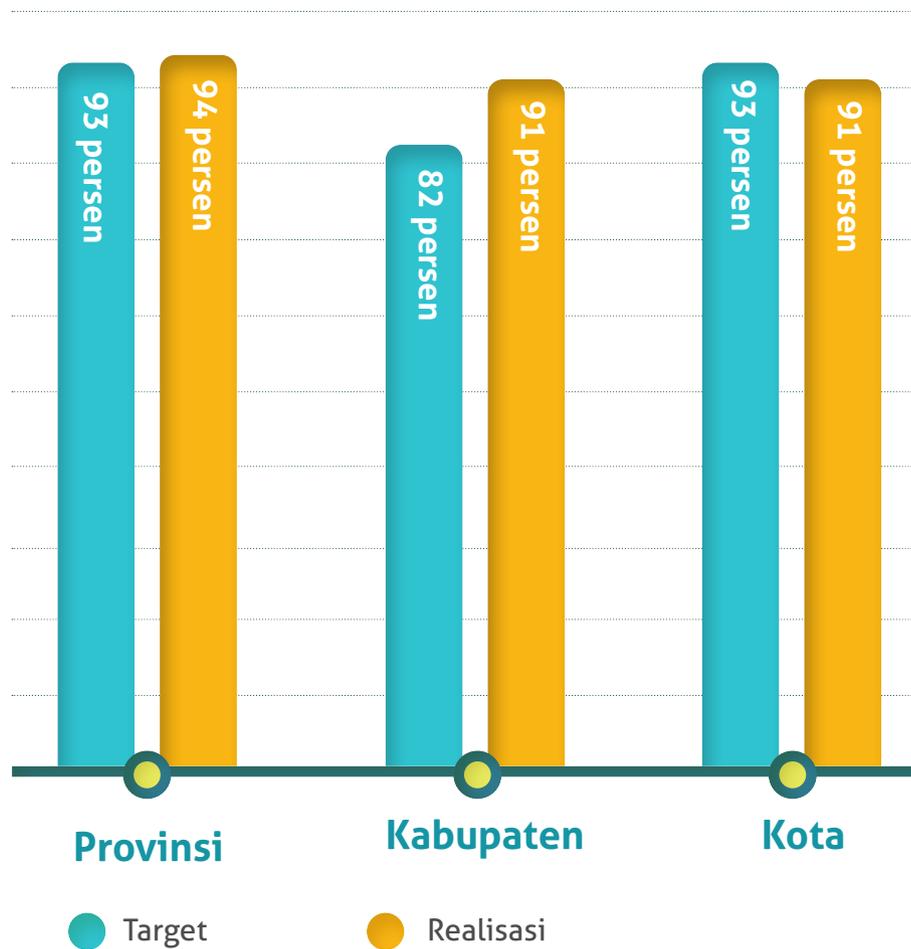
Capaian Opini WTP

Pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membantu pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan negara/daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Sumber: IHPS I 2023

Target dan Realisasi RPJMN 2020-2024



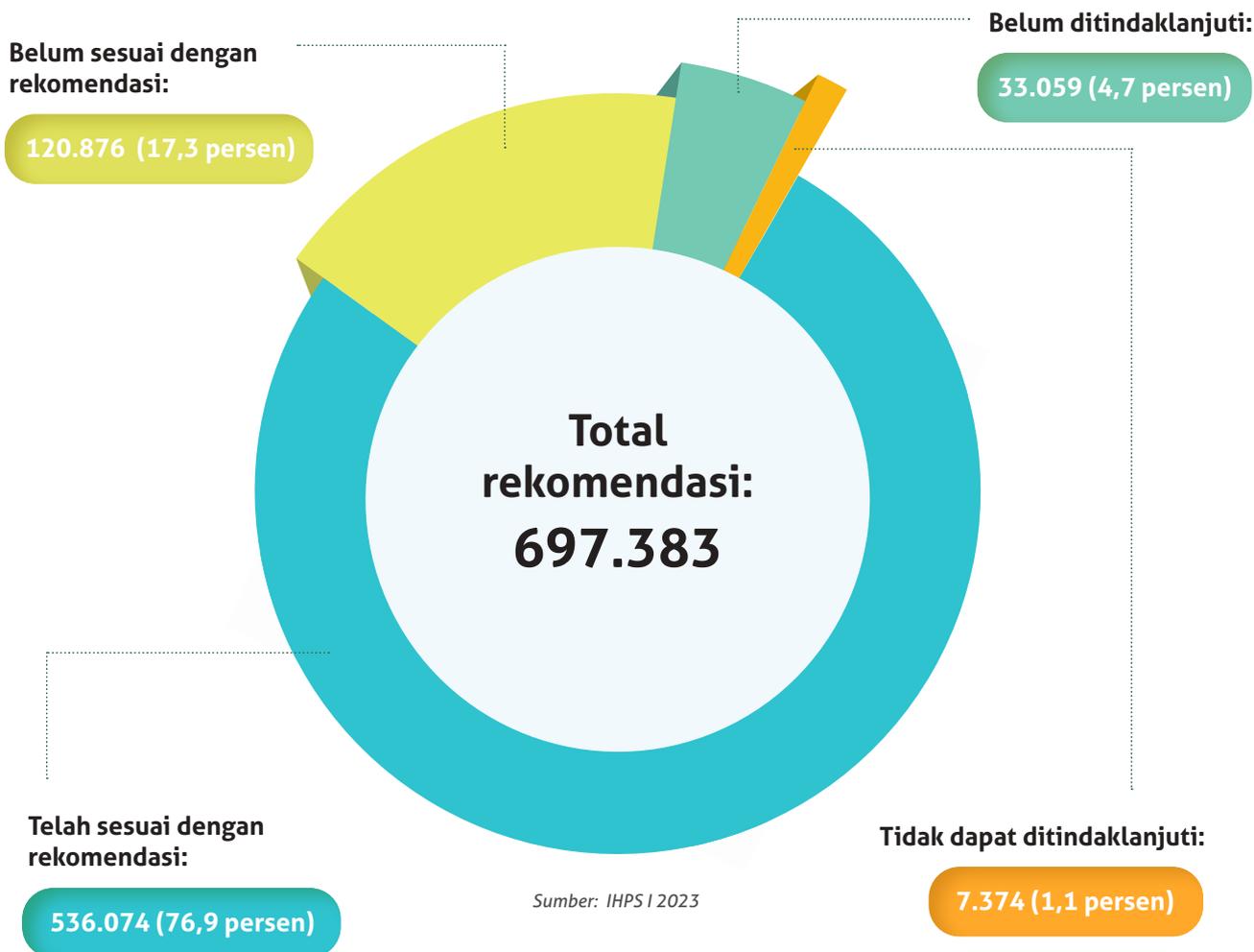
Sumber: IHPS I 2023



Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada periode 2005-semester I 2023, BPK telah menyampaikan rekomendasi sebanyak 697.383. Adapun tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074 (76,9 persen).

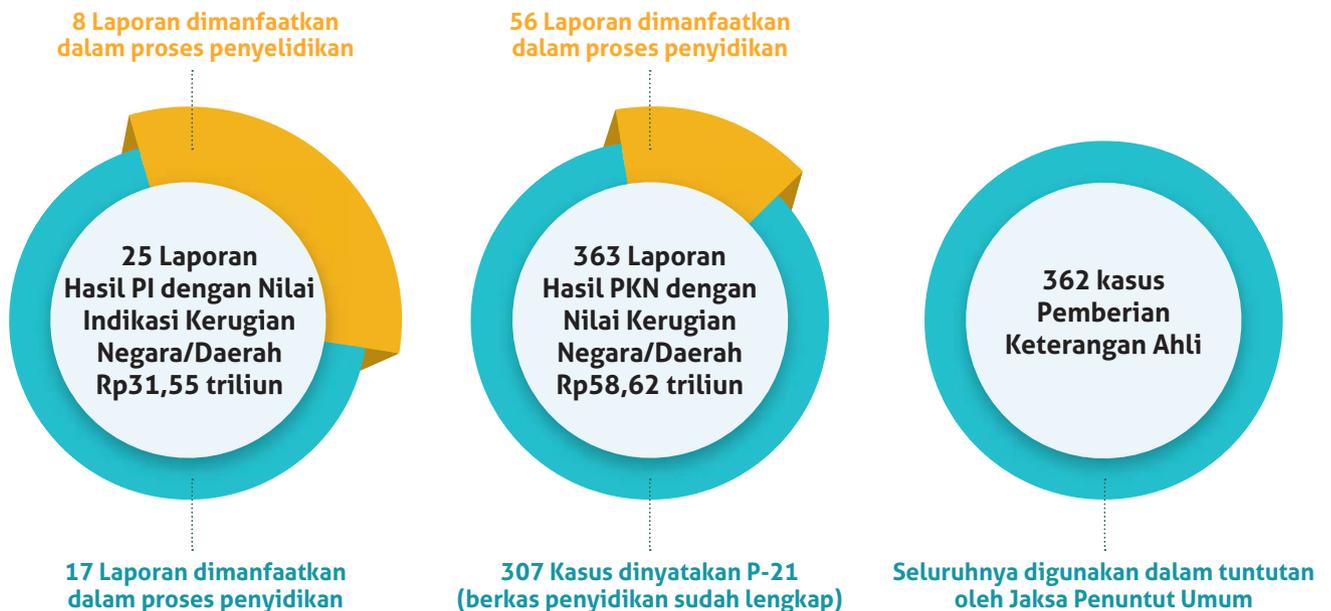
Rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp132,69 triliun, di antaranya sebesar Rp19,20 triliun dari hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023).



Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah (dengan status telah ditetapkan sepanjang periode 2005-semester I 2023)



Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Sepanjang 2017-Semester I 2023



Sumber: IHPS I 2023



Performance Highlight

2023

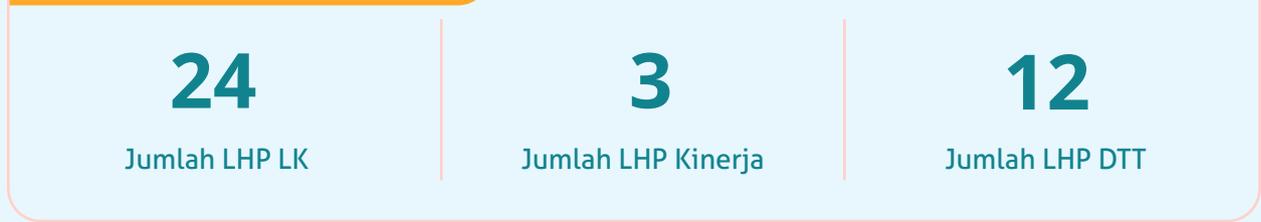
Auditorat Utama Keuangan Negara I



▶ Jumlah LHP: 39

▶ Nilai Total Permasalahan: 10.902.359,44 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan



Entitas yang Diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Auditorat Utama Keuangan Negara II

5.369,96

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

106,98

Nilai Potensi
Kerugian (Rp Juta)

26.046,17

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

▶ Jumlah LHP: 37

▶ Nilai Total Permasalahan: 31.523,11 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan

27

Jumlah LHP LK

3

Jumlah LHP Kinerja

7

Jumlah LHP DTT

Entitas yang Diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Auditorat Utama Keuangan Negara III



▶ Jumlah LHP: 67

▶ Nilai Total Permasalahan: 1.004.111,01 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan



Entitas yang Diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Auditorat Utama Keuangan Negara IV

1.974.231,67

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

1.940.116,35

Nilai Potensi
Kerugian (Rp Juta)

229.977,90

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

▶ Jumlah LHP: 35

▶ Nilai Total Permasalahan: 4.144.325,92 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan

28

Jumlah LHP LK

3

Jumlah LHP Kinerja

4

Jumlah LHP DTT

Entitas yang Diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Auditorat Utama Keuangan Negara V



▶ Jumlah LHP: 456

▶ Nilai Total Permasalahan: 2.272.148,76 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan



Entitas yang Diperiksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Auditorat Utama Keuangan Negara VI

781.891,37

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

3.969.036,10

Nilai Potensi
Kerugian (Rp Juta)

1.514.383,54

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

▶ Jumlah LHP: 424

▶ Nilai Total Permasalahan: **6.265.311,01 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

265

Jumlah LHP LK

90

Jumlah LHP Kinerja

69

Jumlah LHP DTT

Entitas yang Diperiksa



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Auditorat Utama Keuangan Negara VII

3.593.958,89

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

2.777.293,85

Nilai Potensi
Kerugian (Rp Juta)

579.019,69

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

▶ Jumlah LHP: 35

▶ Nilai Total Permasalahan: 6.950.272,43 (Rp Juta)

Kegiatan Pemeriksaan

2

Jumlah LHP LK

4

Jumlah LHP Kinerja

29

Jumlah LHP DTT

Entitas yang Diperiksa



BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Auditorat Utama Investigasi

Jumlah LHP

Jumlah LHP
Pemeriksaan
Investigatif

50 LHP

Jumlah LHP
Penghitungan
Kerugian Negara

705 LHP

Jumlah LHP
Pemberian
Keterangan Ahli

**704 PKA
Persidangan**

Nilai Kerugian

Nilai Indikasi Kerugian
Negara/Daerah

Rp63,10 T

Nilai Kerugian Negara/
Daerah

Rp117,00 T

Pemanfaatan Laporan Hasil PI/PKN/PKA oleh Instansi Berwenang dalam rangka Penegakan Hukum

**50
LHP**

Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI)

17 LHP

Digunakan untuk Tahap Penyelidikan

33 LHP

Digunakan untuk Tahap Penyidikan

**705
LHP**

Pemanfaatan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

108 LHP

Digunakan untuk Tahap Penyidikan

597 LHP

Digunakan untuk Tahap Penyidikan yang sudah lengkap (P-21)

**704
PKA**

Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) pada Tahap Penyidikan Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Persidangan

704 PKA

Digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

-

Tidak digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum



Joint Peer Review antara BPK dan ANAO atas Mongolia National Audit Office

BPK menjadi bagian dari tim *joint peer review* dengan ANAO untuk Mongolia National Audit Office (MNAO). Kegiatan dilaksanakan secara *virtual* dari Jakarta dan fisik di Ulanbaatar Mongolia pada 16 Januari–30 Maret 2023 dengan pendanaan dari Asian Development Bank di bawah proyek “Strengthening the Capacity of the State Audit Organization”.

Kegiatan *peer review* ditujukan untuk menilai kekuatan dan kelemahan operasi MNAO saat ini. Termasuk perbaikan organisasi yang telah dilaksanakan sejak pelaksanaan *peer review* tahun 2016 serta menentukan area yang masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Capaian Internasional



Penandatanganan Pembaharuan MoU dan Pelaksanaan Pertemuan Teknis ke 21 dengan National Audit Department of Malaysia

BPK menyelenggarakan penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman atau MoU dengan NADM pada Senin, 30 Januari 2023. Kegiatan dilakukan secara *virtual* oleh Ketua BPK Isma Yatun yang berada di Jakarta, Indonesia dan Auditor General of Malaysia, Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid di Putrajaya, Malaysia.

Selain penandatanganan MoU, BPK dan NADM juga menyelenggarakan pertemuan teknis ke-21 untuk berbagi pengetahuan mengenai *remote auditing* dan *follow-up audit*.

Kunjungan Tingkat Tinggi Ketua BPK ke BAI Korea

Ketua BPK, Isma Yatun melakukan pertemuan dengan Ketua BAI Korea, Jaehae CHOE di Kantor BAI di Seoul, Republik Korea pada 3 Maret 2023. Pertemuan bertujuan untuk membahas *action plan* kerja sama bilateral ke depan.

Ini mencakup rencana kedua institusi untuk saling mengirimkan pemeriksa dalam rangka mengikuti program *secondment* pemeriksaan ke organisasi internasional di masing-masing SAI. Ketua BPK juga menyambut baik usulan BAI Korea untuk menyelenggarakan pertemuan MIKTA SAI di sela-sela SOM SAI20 di Goa, India pada Maret 2023.

SAI20 – Senior Officers Meeting

Senior officers meeting (SOM) dilaksanakan di Guwahati, India pada 13-15 Maret 2023 dengan tema “Artificial Intelligence and Blue Economy”. Pertemuan SOM bertujuan untuk membahas *draft zero communique* yang akan difinalisasi di *summit*.

BPK memberikan lima masukan atas *zero draft communique*, antara lain:

1. BPK mengusulkan untuk menempatkan kalimat pengantar karena tidak adanya definisi tunggal, pemahaman yang berbeda, dan cakupan yang luas dari *blue economy*.

Kedua, *draft* komunike poin 7 memiliki dua pesan, yaitu advokasi dan upaya SAI. Untuk menyoroti pesan SAI20 kepada komunitas G20, dalam hal ini, mungkin lebih baik untuk menempatkan advokasi dalam poin yang terpisah. BPK mendukung adanya berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pemeriksaan terkait *blue economy*.

2. BPK setuju atas penyusunan pedoman pemeriksaan dan *toolkit* untuk pemeriksaan terkait ekonomi biru. Dalam hal ini, BPK mendorong upaya kolaboratif untuk mengembangkan dan mengusulkan pedoman pemeriksaan *blue economy* internasional kepada kelompok kerja yang relevan di bawah INTOSAI KSC yang diketuai oleh SAI India.
3. Rancangan komunike menyebutkan advokasi SAI tentang tata kelola optimal AI untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, interpretabilitas, penjelasan, dan keberlanjutan. BPK mengusulkan menggunakan kata “reproducibility” untuk menggantikan penjelasan dan keberlanjutan.

General statement yang disampaikan BPK adalah BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada SAI India dalam memimpin SAI20 Senior Officials Meeting sebagai ajang para delegasi berbagi pengalaman dengan antusiasme yang tinggi. Pertemuan ini menunjukkan komitmen terhadap peran SAI dalam kontribusi transparansi dan akuntabilitas khususnya, di dalam komunitas G20.



Institution Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA)

BPK berpartisipasi dalam 19th Steering Committee (SC) Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) di Rabat, Moroko pada 13–16 Maret 2023. Pertemuan ini bertujuan sebagai *kick-off* pelaksanaan *project* INTOSAI WGEA sebagaimana tercantum dalam 2023-2025 *Work Plan*.

Dalam pertemuan ini, BPK ditetapkan sebagai *co-leader* dalam *project sustainability reporting* bersama dengan SAI Thailand. BPK juga menjadi anggota *executive group of climate scanner project*, anggota *environmental accounting project*, anggota *cooperative audit on climate change adaptation action project*, dan anggota *green fiscal policy project*.

APFSD

The 10th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) dilaksanakan di United Nations Conference Centre (UNCC) di Bangkok, Thailand pada 27-30 Maret 2023. Tema tahun ini yaitu "Accelerating the recovery from the coronavirus disease (Covid-19) pandemic and the full implementation of the 2030 agenda for sustainable development at all levels in Asia and the Pacific".

Adapun tujuan tematik yang ingin dicapai yakni:

1. Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi.
2. Tujuan 7: Energi bersih dan terjangkau.
3. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
4. Tujuan 11: Kota dan komunitas berkelanjutan.
5. Tujuan 17: Kerja sama untuk mencapai tujuan.
6. Keterhubungan antara tujuan ini dan tujuan-tujuan lainnya.

BPK memberikan intervensi pada Selasa, 28 Maret 2023. BPK menyampaikan intervensi secara *virtual* pada Agenda Item 4: "Accelerating the implementation of the 2030 agenda through voluntary national reviews (VNR)". Poin-poin yang disampaikan sebagai berikut:

1. VNR Indonesia telah direviu oleh BPK untuk menilai akuntabilitas dan pencapaian implementasi SDGs di Indonesia.
2. Keterlibatan BPK ini turut mendorong Pemerintah Indonesia dalam mencapai target-target program SDGs.
3. Saat ini, Pemerintah Indonesia mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menyampaikan *voluntary local and subnational reviews* sebagai sarana untuk berbagi dan menunjukkan praktik terbaik di tingkat daerah kepada dunia.



Sharing Knowledge on Auditing Water with SAI South Africa

SAI Afrika Selatan mengundang BPK untuk melaksanakan *sharing knowledge on the audit of clean water* secara virtual pada 19 Mei 2023.

Dengan adanya kegiatan ini, SAI Afrika Selatan dan BPK dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan penyediaan air. Khususnya praktik terbaik dalam pengelolaan air bersih.

International Meeting of Performance Audit Critical Thinkers (IMPACT) Tahun 2023

BPK menjadi *guest speaker* dalam gelaran bertajuk International Meeting of Performance Audit Critical Thinkers (IMPACT) 2023 di Canberra, Australia pada 19-20 April 2023. IMPACT merupakan pertemuan para pemimpin organisasi pemeriksa di seluruh wilayah Australia dan Pasifik yang disponsori oleh the Australasian Council of Auditors-General (ACAG).

Tahun ini, kegiatan diselenggarakan oleh the Australian National Audit Office (ANAO) bekerja sama dengan Australian Capital Territory (ACT) Audit Office. Pada kesempatan ini, BPK menyampaikan paparan berjudul "Attracting and developing the auditor of future and the skills our professions need for a digital world".

BPK juga mengangkat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh auditor masa depan pada era digital. Termasuk beragam keterampilan untuk menghasilkan audit berkualitas tinggi.

Selain itu, disampaikan pula terkait penerapan teknologi digital dalam proses pemeriksaan di BPK. Misalnya saja BPK Big Data Analytics (Bidics), Digital Enterprise Architecture BPK (DNA), dan Standardized and Integrated Audit Process (SIAP).



Seminar Internasional

Seminar internasional berjudul “Leveraging the Performance Audit Impact towards Green Economy” diselenggarakan berdasarkan kerja sama hibah Bank Dunia di bawah Program Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM MDTF). Seminar diselenggarakan di Hotel Park Hyatt, Jakarta pada 5-7 Juni 2023.

Tujuan seminar yaitu:

- Memberikan perspektif dan wawasan yang lebih luas tentang ekonomi hijau melalui audit kinerja dan praktik terbaik yang dilakukan oleh SAI dan pemangku kepentingan terkait.
- Memberikan wawasan dan panduan yang kredibel, independen, dan objektif untuk mewujudkan audit kinerja yang lebih baik untuk mendukung perubahan yang lebih baik di sektor publik.
- Forum untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait audit kinerja mengenai isu-isu global terkini, seperti ekonomi hijau.

Pada hari kedua, terdapat sesi *breakout* yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan strategis dalam *green economy*. Termasuk menjangkau usulan/rekomendasi untuk meningkatkan dampak pemeriksaan terkait dengan *green economy*.



Kunjungan Tingkat Tinggi Ketua BPK ke NAA Kamboja

Ketua BPK, Isma Yatun melaksanakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Auditor General of the National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia (NAA Kamboja), Som Kim Suor di Phnom Penh, Kamboja pada 8 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, kedua SAI saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyusunan panduan tindak lanjut.

Pertemuan ini diharapkan menjadi *milestone* penting untuk keberlangsungan kerja sama bilateral dan hubungan yang lebih erat di antara kedua institusi. Khususnya dalam menjawab berbagai isu dan tantangan di bidang pemeriksaan sektor publik.

Senior Management Dialogue

Ketua BPK, Isma Yatun menyambut kunjungan Auditor General ANAO, Grant Hehir dalam rangka senior management dialogue (SMD) pada 8-9 Juni 2023. Rangkaian kegiatan ini, yaitu *courtesy meeting* dilanjutkan paparan dengan topik respons SAI terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Kemudian audit SAI atas laporan kinerja entitas, respons SAI dalam menghadapi tantangan pada masa depan, peran BPK dalam pemberantasan korupsi, serta pengembangan BPK Corporate University.

SAI20 – Summit Meeting

Pertemuan Summit SAI20 diadakan di Goa, India pada 12-14 Juni 2023. Pertemuan yang diselenggarakan bertujuan untuk memfinalisasi *Communique* SAI20 ini dihadiri oleh ketua SAI masing-masing negara anggota G20.

Dalam pertemuan ini, Ketua BPK menyampaikan bahwa SAI memiliki peran penting dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam *blue economy*. SAI20 Summit juga disebut menghasilkan *compendium blue economy* dan *artificial intelligence*. Kompendium ini berisi berbagai contoh kasus temuan audit dalam tema permasalahan *blue economy* dan *artificial intelligence* dari masing-masing negara anggota.



Penandatanganan MoU dalam Bidang Pemeriksaan Sektor Publik antara BPK dan CAG India

Ketua BPK, Isma Yatun melaksanakan penandatanganan MoU dalam bidang pemeriksaan sektor publik dengan Comptroller & Auditor General (CAG) India, Shri Girish Chandra Murmu tanggal 12 Juni 2023 disela-sela pelaksanaan SAI20 Summit di Goa, India.

Melalui MoU ini, diharapkan kerja sama kedua SAI dapat terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kontribusi lembaga bagi peningkatan pengelolaan keuangan sektor publik di negara, kawasan, dan dunia.





Penandatanganan MoU dalam Bidang Pemeriksaan Sektor Publik Antara BPK dan TCA Turkiye

Ketua BPK, Isma Yaton melaksanakan penandatanganan MoU dalam bidang pemeriksaan sektor publik dengan Presiden TCA, Metin Yener pada 27 Juli 2023. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi babak baru bagi BPK dan TCA setelah keduanya aktif berkolaborasi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam forum ASOSAI dan INTOSAI.

Dalam kegiatan ini, BPK dan TCA berkesempatan berdiskusi untuk mengeksplorasi peluang kerja sama. Termasuk dalam bidang pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam proses audit, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan program pelatihan bagi auditor.

Ketua ASEAN Audit Committee (AAC)

Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia, dalam hal ini BPK, menjabat sebagai Ketua ASEAN Audit Committee (AAC) yang berkewajiban untuk mempersiapkan pertemuan AAC.

Pada tahun ini, Ketua BPK, Isma Yaton memimpin pertemuan AAC ke-48.

Pertemuan AAC ke-48 diselenggarakan melalui *video conference* pada 6 Juli 2023.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari ASEAN member states (AMS), the Committee Permanent Representatives Working Group (CPR-WG) of ASEAN, the Democratic Republic of Timor-Leste sebagai *observer*, the *external auditor* PricewaterhouseCoopers (PwC), dan the ASEAN Secretariat (ASEC).

Dalam pertemuan tersebut, BPK mengusulkan untuk merevisi AFARP 2018 Rule 10.2.2 terkait persyaratan menjadi pemeriksa eksternal yang semula harus *first tier audit firm*. Ini kemudian diperluas menjadi *first tier audit firm* dan *supreme audit institution of ASEAN member states* telah masuk dalam *report* dan pembahasannya akan dilaksanakan kemudian.

BPK juga mengusulkan tambahan kalimat berupa poin penyampaian dari Ketua BPK pada saat *opening remark*. Ini dengan penekanan mendorong kerja sama antarorganisasi dan entitas yang terkait dengan ASEAN:

"The Chair encouraged collaboration among organizations, units, and entities associated with ASEAN, such as the supreme audit institution (SAI) of ASEAN member states in contributing to better transparency, accountability, and governance of the ASEAN Secretariat as well as for the purpose of capacity building and knowledge sharing". Sekaligus penekanan kembali Agenda item 7, paragraf 30 dengan menambahkan kalimat *"...such as the supreme audit institution of the member states, and ASEANSAI..."*.

Pembicara dalam “High-Level Panel Discussion at the Launch of the Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition”

Ketua BPK menjadi salah satu panelis dalam *high-level event* “The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition-A High-Level Event Call to Action”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) di Markas Besar PBB di New York, AS Senin, 10 Juli 2023. Digelar di sela-sela United Nations High Level Political Forum (UNHLPF), kegiatan ini bertujuan untuk meluncurkan laporan yang berjudul “The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition.”

Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada negara anggota, sektor swasta, *civil society*, dan masyarakat umum untuk berdiskusi dan memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali metode untuk memperkuat rekomendasi menjelang SDG Summit. Kesempatan ini merupakan cara untuk mempercepat pencapaian SDGs untuk memastikan kehidupan yang lebih baik.

Side Event “Moving Towards Full SDG Implementation by Partnering for Greater Audit Impact of SDG Audit”

BPK menjadi tuan rumah penyelenggaraan *side event* “Moving towards full SDG implementation by partnering for greater audit impact of SDG audit”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida di PTRI New York, AS pada 13 Juli 2023. *Side event* diselenggarakan dalam format *roundtable discussion*.

Tujuan dari *side event* ini yaitu:

1. Menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi rekomendasi audit.
2. Membahas cara memperkuat ekosistem pemangku kepentingan SAI untuk audit SDG yang relevan.
3. Implementasi rekomendasi yang lebih baik sehingga memberikan dampak positif terhadap implementasi SDG.

UN HLPF HLS (UN High Level Political Forum on Sustainable Development)

Implementasi penuh Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan “High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High Level Segment” (HLPF-HLS on SDGs) di New York, Amerika Serikat pada 10-20 Juli 2023. Acara ini merupakan pertemuan tingkat tinggi secara global dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan di tingkat regional, Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) pada bulan Maret sebelumnya.

Delegasi BPK RI menyampaikan pernyataan terkait kondisi dan pengalaman dalam melaksanakan *review* atas perkembangan *voluntary national reviews* di Indonesia.



Kontributor dalam Penyusunan “IBP/UNDESA Handbook” dan Pembicara dalam High-Level Global Launch of Handbook on Supreme Audit Institutions’ Contribution to Enhancing Budget Credibility through External Audits Collaboration

Ketua BPK, Isma Yatun hadir sebagai pembicara dalam peluncuran *handbook* “Strengthening Budget Credibility Through External Audits-A Handbook for Auditors” yang diselenggarakan secara virtual pada 26 Juli 2023.

BPK berkomitmen sebagai anggota *core group drafting* proyek penyusunan “Handbook for Auditors-Strengthening Credibility through External Auditors” yang dimulai sejak 19 Oktober 2021. Proyek ini merupakan kerja sama United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Public Institutions and Digital Government (UNDESA DPIDG) dan International Budget Partnership (IBP). Sebagai anggota *core group drafting*, BPK merupakan ketua Chapter 4. Auditing the Performance of the Public Financial Management System bersama dengan *supreme audit institution* (SAI) Zambia. Keduanya menjadi kontributor untuk bagian *assessing budget credibility risks at the program/entity level and strengthening budget credibility through audit reports and follow-up*.

The 7th Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Big Data (INTOSAI WGBD)

BPK menghadiri 7th Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Big Data (INTOSAI WGBD) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, pada 13-15 September 2023.

Pertemuan ini dihadiri lebih dari 65 peserta dari 26 *supreme audit institutions* (SAI). Tujuannya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta melakukan identifikasi tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam bidang audit terkait *big data*.

Dalam pertemuan ini, BPK memberikan paparan yang berjudul “Operationalization of Big Data Analytics”. Pada paparannya, BPK menjelaskan tentang tiga rencana strategis BPK dalam melaksanakan *digital transformation*. Tiga rencana itu, yakni implementasi proses bisnis digital, implementasi tata kelola teknologi informasi, dan implementasi Big Data Analytics (Bidics).

Penetapan BPK sebagai Tuan Rumah INCOSAI 2028

INCOSAI (International Congress Supreme Audit Institution) adalah kongres yang diadakan setiap 3 tahun sekali dan dihadiri oleh anggota INTOSAI. SAI yang terpilih sebagai tuan rumah INCOSAI otomatis akan terpilih menjadi Ketua INTOSAI selama 3 tahun ke depan.

Ketua INTOSAI saat ini (periode 2022-2025) adalah SAI Brasil sebagai perwakilan regional Amerika. Sedangkan periode 2025-2028, keketuaan INTOSAI akan dijabat oleh SAI Mesir sebagai perwakilan regional Afrika. Untuk keketuaan 2028-2031 dan tuan rumah INCOSAI 2028, akan menjadi giliran untuk regional Asia.

Menindaklanjuti pemilihan regional Asia tersebut, pada April 2022 Sekretariat ASOSAI mengirimkan surat ke seluruh anggota ASOSAI terkait tawaran untuk menjadi kandidat *host* INCOSAI 2028. SAI yang menominasikan diri sebagai *host* INCOSAI semula sebanyak 5 SAI, yaitu SAI Australia, Korea, India, Indonesia, dan Saudi Arabia.

Penentuan tuan rumah INCOSAI 2028 ditetapkan dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke-49 yang diadakan di Busan, Korea Selatan pada 20-22 September 2023. Pemilihan dilakukan oleh 12 SAI anggota ASOSAI Governing Board, yaitu SAI Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Turkey, India, Cina, Jepang, Pakistan, Korea, Arab Saudi, dan Rusia.

Melalui penggalangan dukungan baik melalui jalur surat, *e-mail*, dan pertemuan bilateral secara langsung, delegasi BPK secara intensif meminta dukungan untuk nominasi BPK dari anggota ASOSAI GB. Untuk memastikan suara dukungan kepada BPK tetap aman, delegasi BPK melakukan serangkaian penggalangan pada pertemuan ASOSAI Governing Board di Busan, 20-22 September 2023.

Pertemuan bilateral dilakukan dengan SAI Arab Saudi, Malaysia, Korea, dan Pakistan, Jepang, Thailand, Filipina, Cina, Vietnam, dan Turkiye di sela-sela Pertemuan ASOSAI GB. Termasuk pendekatan kepada kompetitor SAI India untuk meminta dukungan.

Hasil *voting* menyatakan SAI Indonesia mendapat suara lebih banyak dibandingkan SAI India sehingga diputuskan sebagai tuan rumah INCOSAI XXVI pada 2028. Selanjutnya, hasil pemilihan BPK sebagai tuan rumah INCOSAI 2028 dan Ketua INTOSAI 2028-2031 akan ditetapkan pada ASOSAI Assembly pada 2024.





The 9th Seminar on Environmental Auditing and Working Meeting of Asian Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing (ASOSAI WGEA)

BPK berpartisipasi dalam 9th Seminar on Environmental Auditing and Working Meeting of Asian Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Environmental Auditing (ASOSAI WGEA) di Astana, Kazakhstan pada 23-25 Agustus 2023.

Pertemuan ini dihadiri lebih dari 65 peserta dari 26 *supreme audit institutions* (SAI). Tujuannya, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta melakukan identifikasi tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam bidang audit terkait *big data*.

Dalam pertemuan, ini BPK memberikan dua presentasi, yaitu "Audit of Energy Transition Policy as Part of Climate Change Mitigation" dan "Audit of Community-Based Drinking Water and Domestic Wastewater Infrastructure Supporting Basic Services to Communities".

Pertemuan ini sekaligus menetapkan BPK sebagai pemenang 2nd ASOSAI WGEA Green Vision Awards mengalahkan SAI Philippines dan SAI Maldives. Pada 2nd ASOSAI WGEA Green Vision Awards ini, BPK mengirimkan "Performance Audit of Clean Energy-A Green Vision of BPK in Assessing the Effectiveness of Clean Energy Policies for Greener Tomorrow".

Peer Review 2024

Peer review BPK tahun 2024 dilaksanakan bersama oleh SAI Swiss dan SAI Jerman. Pada Oktober 2023, tim *peer review* SAI Swiss (Switzerland Federal Audit Office) melakukan *IT self assessment* sebagai bagian dari *peer review* BPK 2024.

Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Progress towards the 2030 Agenda - Promoting Sustainable, Resilient and Innovative Solutions

BPK diundang hadir secara fisik sebagai pembicara dalam simposium regional bertema "Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Progress towards the 2030 Agenda-Promoting Sustainable, Resilient and Innovative Solutions". Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hibrida di Incheon, Korea pada 17-19 Oktober 2023.

Kegiatan ini digelar oleh UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) melalui Project Office on Governance (UNPOG) bekerja sama dengan Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Republik Korea dan Incheon Metropolitan City. Simposium ini bertujuan untuk membekali peserta dengan *tools* dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat mempercepat pencapaian SDGs.

Dalam acara ini, BPK diundang hadir secara fisik sebagai pembicara *strategic foresight for forward-looking policies and programmes in the context of uncertainty*. Kemudian diharapkan berfokus kepada tema "Strategic Foresight Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities and Challenges for a Resilient Government".

Berdasarkan hasil diskusi dalam simposium, diketahui bahwa SDGs tetap menjadi peta jalan terbaik untuk dunia yang lebih baik. Kemitraan akan menjadi kunci dalam 7 tahun ke depan, di samping saling belajar dan berbagi pengetahuan antarnegara. PBB juga harus berinvestasi lebih banyak dalam meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang. Termasuk mendukung upaya koherensi kebijakan, masalah iklim, serta dalam memajukan transformasi digital.





IDI Strategy, Performance Measurement, and Reporting (SPMR)

IDI Strategy, Performance Measurement, and Reporting (SPMR) Initiative Round 3 Workshop for Resource Persons diselenggarakan di Tirana, Albania pada 17-19 Oktober 2023. *Workshop* ini bertujuan untuk menyusun pendekatan penyampaian materi baru terkait SPMR Round III dan mendiskusikan tingkat keterlibatan *resource person* dalam *round III* ini.

DI Strategy, Performance Measurement, and Reporting (SPMR) Initiative Round 3 Workshop for Resource Persons diselenggarakan di Tirana, Albania pada tanggal 17-19 Oktober 2023. *Workshop* ini bertujuan untuk menyusun pendekatan penyampaian materi baru terkait SPMR *Round III* dan mendiskusikan tingkat keterlibatan *resource person* dalam *round III*.

Project Leader of the 13th ASOSAI Research Project on Remote Audit

Sebagai SAI yang mengusulkan topik *remote audit*, BPK ditunjuk oleh ASOSAI GB ke-57 pada 2021 sebagai Ketua Proyek Riset ASOSAI ke-13 untuk periode 2021-2024. Beranggotakan 17 SAI dan ARABOSAI sebagai *observer*, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan laporan penelitian terkait *best practices* mengenai *remote audit* yang dapat dijadikan referensi oleh para anggota ASOSAI ketika melakukan pemeriksaan jarak jauh. Laporan terdiri atas 6 bab dengan tim khusus yang berkewajiban menyusun setiap babnya.

Kegiatan per November 2023 yang telah dilaksanakan meliputi survei bab 2 dan 3, penyusunan bab 2 "Concept and Definition" (ketua tim: Palestina & Thailand), dan bab 3 "Audit Planning Phase" (ketua tim: Thailand). Telah diselenggarakan pula *the 3rd meeting* pada 5 April 2023 dan *the 4th meeting* pada 18 Oktober 2023 secara *virtual* untuk mendiskusikan konsep bab 2 dan 3. Dalam pertemuan rutin, diagendakan pula sesi khusus *sharing experience* terkait bab yang sedang didiskusikan. Hal ini untuk mengumpulkan studi kasus per negara untuk dimasukkan ke dalam laporan proyek. Indonesia berkesempatan memaparkan studi kasusnya di pertemuan ke-3. Rencana dirumuskan dan didiseminasikan survei bab 4 terkait "Audit Fieldwork Phase" pada penghujung 2023.





BPK Menjadi SME Forensic Audit Training untuk Auditor State Audit Office of Vietnam (SAV)

Pemeriksa BPK, menjadi *subject matter expert* (SME's) dalam *forensic audit training* untuk auditor di SAV yang dilaksanakan di kantor pusat SAI di Hanoi pada 31 Oktober-2 November 2023. Pelatihan tersebut diikuti oleh 46 auditor dan pegawai dari kantor pusat serta 13 kantor perwakilan SAV dari seluruh provinsi di Vietnam.

Dalam kesempatan ini, SME dari AUI berbagi ilmu tentang peran BPK dalam pemberantasan korupsi; struktur dan tugas AUI; tahapan dalam audit investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli; serta tentang forensik audit dan *digital forensic*. Melalui pelatihan ini, SAV diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari BPK dalam pemeriksaannya.

Webinar Internasional Terkait *Blue Economy*

International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED) India berkolaborasi dengan INTOSAI WGEA menyelenggarakan webinar internasional "Audit of Blue Economy, Issues and Challenges with the special reference to SDG 14" pada 25-26 September 2023 secara *virtual*. Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para auditor berbagai SAI terkait audit *blue economy*.

Dasar penyelenggaraan webinar karena SAI memiliki peranan penting dalam usaha pencapaian SDG 14, dalam hal ini yaitu *life below water*. Kemudian memperbaiki keadaan lautan serta membangun strategi dan merancang cara untuk meningkatkan kontribusi *blue economy* dalam perekonomian nasional. Dalam webinar ini, BPK menjadi *resource person* di sesi "Auditing Government Efforts to Adapt to Climate Change and Ocean Acidification in Marine Environment: Experience Sharing".

BPK Ditetapkan Sebagai Sekretariat ASEANSI Periode 2024-2029

BPK dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretariat ASEANSI periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan dalam the 7th ASEANSI Summit yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada 2 November 2023.

Sebelumnya, BPK telah menjalankan perannya sebagai sekretariat sejak pembentukan ASEANSI tahun 2011. Sebagai Sekretariat ASEANSI, BPK berperan sebagai *driving force* kegiatan yang dilakukan dengan memastikan kegiatan yang direncanakan berjalan baik, bertanggung jawab mengelola administrasi kesekretariatan ASEANSI, serta berperan dalam pengembangan kerja sama ASEANSI dengan *stakeholder*.

Dalam penetapan yang dilakukan di *summit* tersebut, hadir para ketua SAI dari anggota ASEAN yang memberikan persetujuan atas penetapan isu strategis, yaitu pergantian keketuaan ASEANSI; penetapan revisi *rules and procedures*, ketua komite dan anggotanya, auditor ASEAN SAI, serta penunjukan sekretariat.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi kepada para ketua SAI atas kepercayaan yang diberikan. BPK akan mendorong kerja sama dengan mitra strategis, seperti organisasi regional dan *development partners*, serta mendorong *internal governance* yang lebih baik.

Di tengah tantangan yang dinamis, BPK juga akan lebih mendorong inklusivitas dengan lebih *agile*. Termasuk juga terbuka untuk bekerja sama dengan anggota ASEANSI dalam menjalankan kesekretariatan.





Penghargaan BPK



Penghargaan Perpustakaan Rujukan Nasional dengan Akreditasi A



Perpustakaan BPK menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai rujukan nasional akreditasi perpustakaan.



Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



BPK memperoleh penghargaan Aninditha Wistara Data dari Badan Pusat Statistik. Penghargaan ini didapat atas prestasi baik BPK dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023.



Penghargaan atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2023 pada Kantor Pusat



BPK mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII berupa Peringkat I Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar (di atas 750 Miliar Rupiah).



Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Tahun 2023



BPK memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2023 kategori lembaga negara.



Laboratorium Forensik Digital BPK Terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017



Laboratorium Forensik Digital BPK berhasil mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai laboratorium pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.



Warta Pemeriksa Raih Bronze di Anugerah Humas Indonesia 2023



Majalah *Warta Pemeriksa* BPK meraih penghargaan *bronze winner* dalam Anugerah Humas Indonesia 2023.



Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

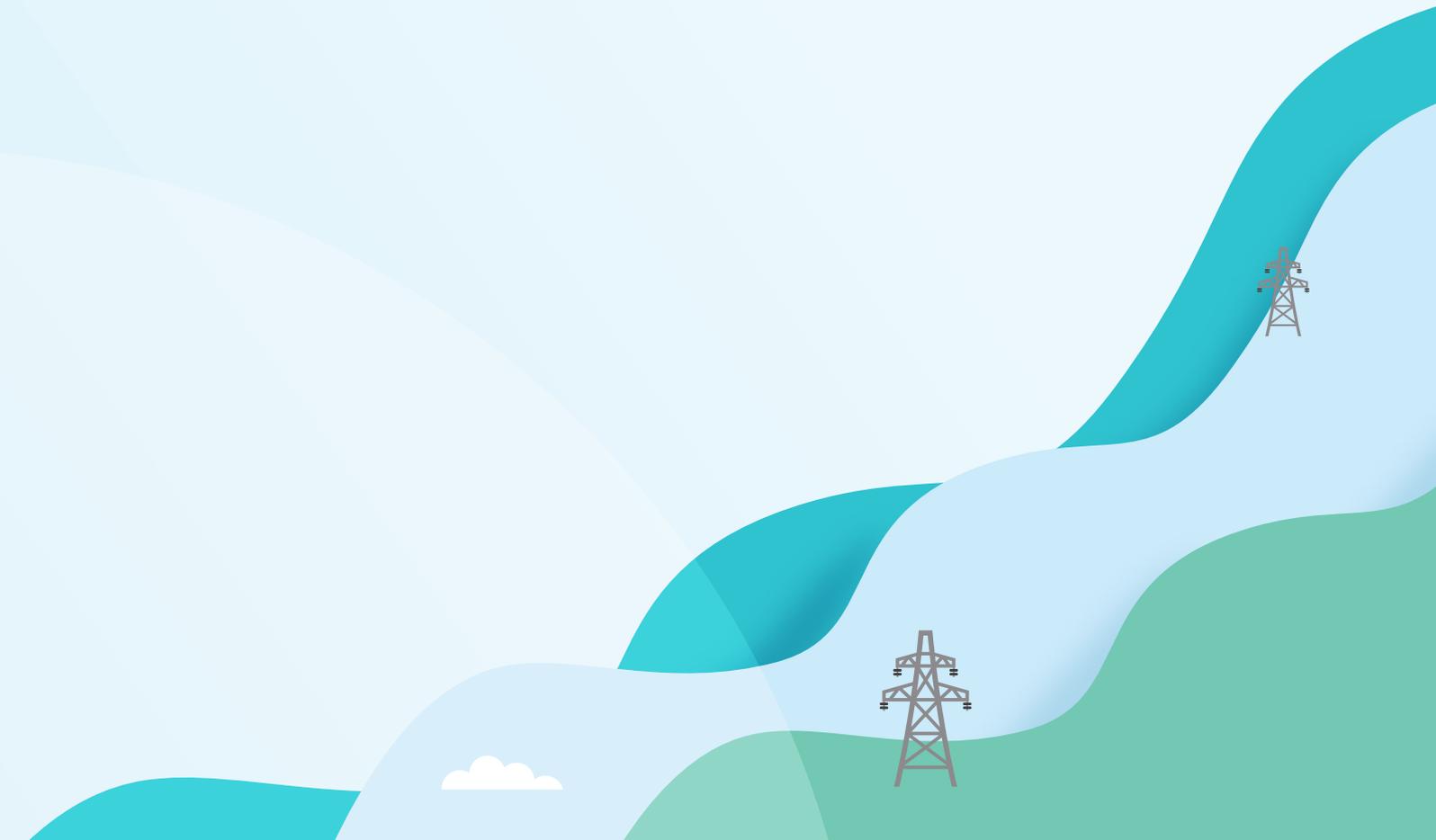


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.



BAGIAN 2

Mengawal SDGs





17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)

1

Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Mana Pun



2

Tanpa Kelaparan

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



4

Pendidikan Berkualitas

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



5

Kesetaraan Gender

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan



6

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua



7

Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua



8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



9

Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi





10

Berkurangnya Kesenjangan

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara



11

Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan



12

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



13

Penanganan Perubahan Iklim

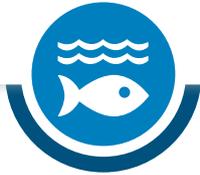
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya



14

Ekosistem Lautan

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan



15

Ekosistem Daratan

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



16

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan



17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan





Terus Mengawal SDGs di Tanah Air

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen yang kuat untuk mengawal program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Setahun setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), BPK pada semester I 2018 melakukan pemeriksaan mengenai persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs (Pemeriksaan Preparedness SDGs dan Implementation SDGs)

Hasil pemeriksaan tersebut pun disampaikan BPK dalam acara High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development Goals pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Demikian pula, pemeriksaan kinerja BPK pada semester 1 tahun 2019, atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator.

SDGs yang sesuai dengan tema Voluntary National Review (VNR) 2019 dengan tema Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, yaitu SDGs Tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17.

Pemeriksaan SDGs (*Dedicated*)

Pemeriksaan terkait SDGs terus dilakukan BPK. Pada semester 1 tahun 2021, misalnya, BPK melakukan dua pemeriksaan pendahuluan atas pemeriksaan SDGs yang bersifat *dedicated* yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci pada semester 2 tahun 2021.

Pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja SDG 3D (Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global).



Pemeriksaan Kinerja SDG 11.2 atas Program Pendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Transport*).



Pada tahun 2022-2024, BPK juga tetap melakukan pengawalan implementasi SDGs di Indonesia melalui pemeriksaan SDGs (*dedicated*) pada target-target tertentu, antara lain, target 3.8 tentang kesehatan universal, target 2.1 tentang kecukupan pangan, target 16.6 tentang peningkatan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan, serta target 5 tentang kesetaraan gender.

Review atas Voluntary National Review (VNR)

Peran BPK sangat penting untuk mengawal agar Agenda 2030 berada di jalur yang benar dan memastikan bahwa pembuat kebijakan yang terlibat di dalamnya lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs, dengan menyampaikan VNR setiap 2 tahun di HLPF. BPK melakukan review VNR dan kemudian menerbitkan laporan review, di mana BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan. Review atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 adalah sebagai respon BPK atas permintaan dari Tim Koordinasi Nasional SDGs Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan BPK menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan laporan VNR yang akurat dan berbasis bukti.

Peran BPK sangat penting untuk mengawal agar Agenda 2030 berada di jalur yang benar dan memastikan bahwa pembuat kebijakan yang terlibat di dalamnya lebih transparan, akuntabel, dan inklusif dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan Prinsip 12 INTOSAI, BPK mengharapkan review VNR Indonesia 2021 menjadi langkah awal kerja sama konstruktif lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga audit untuk memperkuat VNR dan sebagai praktik yang baik yang dapat dijadikan pelajaran bagi negara lain dan lembaga audit.

BPK dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama konstruktif di masa mendatang guna memperkuat tindak lanjut proses review implementasi Agenda 2030 di Indonesia.

Sentra Koordinasi SDGs

Sejak SDGs disepakati pada tahun 2015, bentuk kontribusi BPK dalam pencapaian agenda global SDGs tidak hanya terkait dengan pemeriksaan saja. Bentuk kontribusi BPK lainnya adalah dengan menggelar seminar terkait SDGs, review atas VNR, dan partisipasi BPK dalam kegiatan internasional baik sebagai pembicara maupun bentuk partisipasi lainnya.

Untuk mengoptimalkan pemeriksaan SDGs baik secara *dedicated*, *embedded*, maupun pelaksanaan review atas VNR agar lebih efektif, efisien, bersinergi, dan lebih memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat, diperlukan suatu tim lintas sektor atau sentra koordinasi SDGs yang dapat mengawal strategi pemeriksaan SDGs di BPK.

Sentra koordinasi SDGs sangat diperlukan karena SDGs bersifat lintas sektor dan koordinasi antar sektor harus berjalan dengan baik agar BPK dapat berkontribusi secara maksimal dalam pencapaian SDGs.

Sentra Koordinasi SDGs mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan dengan satuan kerja terkait yang berkaitan dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs, berupa:

Program *Capacity Building* meliputi pengembangan kapasitas institusi/sistem organisasi (perencanaan, strategi, proses bisnis, sistem dan prosedur, konsultasi, kepemimpinan, tata kelola, dan lain-lain) dan kapasitas SDM, terkait dengan peran BPK dalam mengawal pencapaian SDGs baik secara nasional maupun internasional;

Program Penyusunan Kajian meliputi penyusunan publikasi dan pedoman yang berguna untuk penyempurnaan pemeriksaan SDGs di BPK dan dapat menyumbangkan pemikiran kepada dunia internasional mengenai bagaimana pemeriksaan SDGs sebaiknya dilaksanakan;

Program Advokasi yaitu program yang bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan strategis, baik secara internal (bagi para pimpinan/manajemen unit kerja pemeriksaan) dan eksternal (nasional dan internasional) mengenai Agenda 2030 dan SDGs serta pemeriksaan SDGs.



2018

Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Implementasi SDGs di Indonesia (*Preparedness SDGs*)

Perjalanan BPK dalam Mengawal SDGs

2019

- ▶ Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pemerintah yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian SDGs
- ▶ Berpartisipasi pada penyampaian VNR Indonesia ke-2 di UN HLPF
- ▶ Menyelenggarakan seminar internasional bertajuk *Strengthening External Oversight on Implementation of SDGs*

2017

Berpartisipasi pada penyampaian VNR Indonesia ke-1 di United Nations High Level Political Forum (UN HLPF)

Menjadi Rujukan Dunia

BPK tak hanya berkontribusi dalam pencapaian SDGs di Tanah Air. Sebagai bagian dari komunitas global, BPK juga memainkan peran penting dalam pencapaian SDGs di dunia internasional. Pemeriksaan BPK bahkan menjadi rujukan bagi lembaga pemeriksa di berbagai negara.

Untuk mendorong percepatan SDGs global, BPK juga sering membagikan pengalaman pemeriksaan SDGs melalui berbagai forum. BPK pada November 2023, misalnya, menggelar pelatihan internasional berjudul "Training on Auditing SDGs: Energy Transition As Part of Green Economy" di Bali.

Pelatihan yang digelar selama lima hari pada 28 November - 1 Desember 2023 itu dihadiri oleh 28 peserta dari 12 negara, antara lain, Brazil, China, India, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi.

Melalui pelatihan itu, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK tentang audit lingkungan, energi terbarukan, dan perubahan iklim, menjadi bahan rujukan dan masukan bagi dunia internasional.





BAGIAN 3

Profil BPK





Tentang BPK

Awal Pembentukan

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R Soerasno.

1
Januari
1947

14
Desember
1949

6
November
1948

1
Oktober
1950

Kedudukan di Yogyakarta

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950)

Pada tanggal 17 Agustus 1950, bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, sejak tanggal 1 Oktober 1950, Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950.

Dewan Pengawas Keuangan

Ketika itu, terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949. Kemudian, dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS.





Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945)

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan

Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai menteri koordinator dan menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan ke posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No. 5 tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Perpu No. 6 Tahun 1964

Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (Perpu) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

UU No. 5 Tahun 1973

TAP MPR No. VI/MPR/2002

Independen dan Profesional

Dalam era Reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002. Dukungan ini memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Ini ditegaskan dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.





76 Tahun BPK

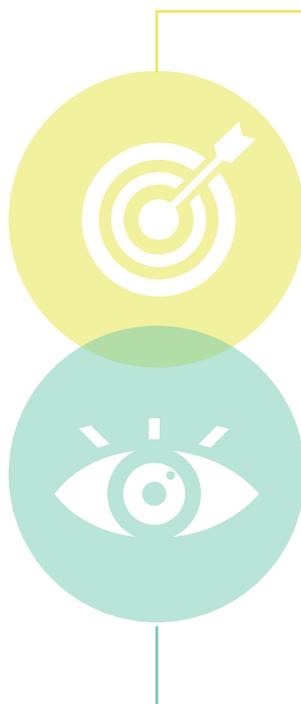
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Awal berdiri pada 1 Januari 1947, BPK kini telah genap berusia 76 tahun. Seiring dengan perkembangan waktu, BPK juga terus mengalami perubahan. Meskipun begitu, tujuan BPK tidak pernah berubah, yaitu untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Visi dan Misi BPK

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.



Misi

- ▶ Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
- ▶ Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
- ▶ Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dasar Hukum

a

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIII A - Badan Pemeriksa Keuangan

b

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

c

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

d

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

e

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Nilai-Nilai Dasar

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.



Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.



Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.





Tujuan

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Tugas

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.



Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan.
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
11. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
12. Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
13. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK.
14. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain
16. Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
17. Memberi keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



Profil Pimpinan BPK







Ketua BPK RI

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua.
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK.
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek Tugas dan Wewenang

- Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.

Wakil Ketua BPK RI

**Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA.,
CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA.**

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua.
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek Tugas dan Wewenang

- Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.

Anggota I BPK RI

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang

Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Anggota II BPK RI

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFA., CertDA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Plt. Anggota III BPK RI

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV BPK RI

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA., CFA.

Tugas dan Wewenang

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V BPK RI**Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.****Tugas dan Wewenang**

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI BPK RI**Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.****Tugas dan Wewenang**

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII BPK RI**Dr. Slamet Edy Purnomo S.E., M.M., CertDA, CFrA, CIAE****Tugas dan Wewenang**

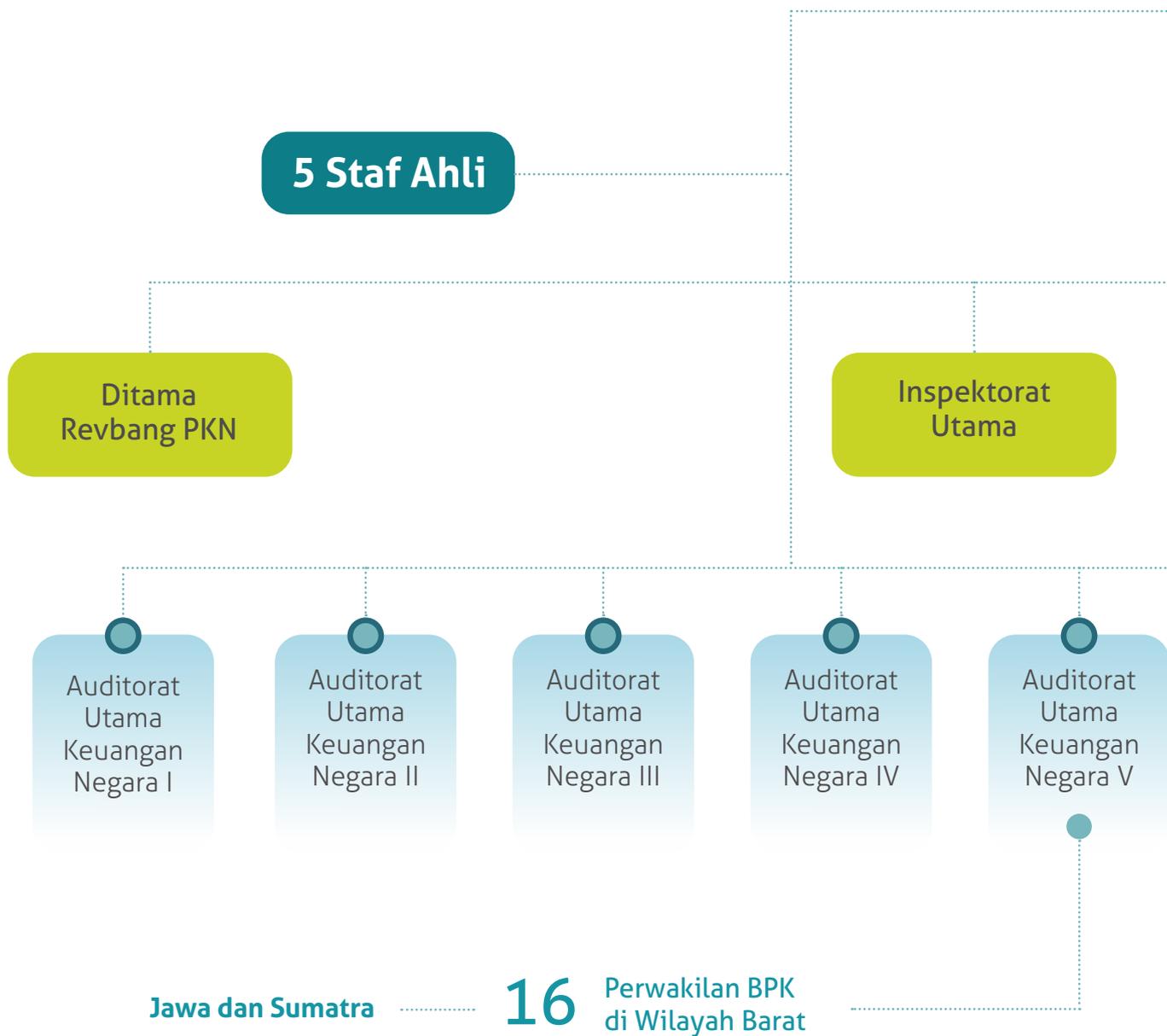
Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Struktur Organisasi BPK RI



Catatan:

BPK memiliki kelompok jabatan fungsional di setiap struktur eselon II. Rincian jabatan fungsional tersebut dan peta jabatannya diatur lebih lanjut di Peraturan Sekretaris Jenderal BPK No. 80 dan 81 Tahun 2019.

Ketua, Wakil Ketua, dan 7 Anggota

Sekretariat
Jenderal

Badiklat
PKN

Ditama
Binbangkum
PKN

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara VI

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara VII

Auditorat
Utama
Investigasi

18 Perwakilan BPK
di Wilayah Timur

- Bali,
- Nusa Tenggara,
- Kalimantan,
- Sulawesi,
- Maluku,
- Papua



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III

Sekretariat Jenderal

- Sekretariat Pimpinan
- Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
- Sumber Daya Manusia
- Keuangan
- Teknologi Informasi
- Umum
- Pusat Kemitraan Global

Unit Pelaksana Tugas Penunjang

Inspektorat Utama

- Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
- Penegakan Integritas

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

- Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN
- Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN
- Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN

Unit Pelaksana Tugas Periksa

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN V, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN VI, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Wakil Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN V

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VI

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN

- Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
- Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN

- Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah
- Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Staf Ahli

- Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
- Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
- Bidang Manajemen Risiko
- Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya
- Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Investigasi

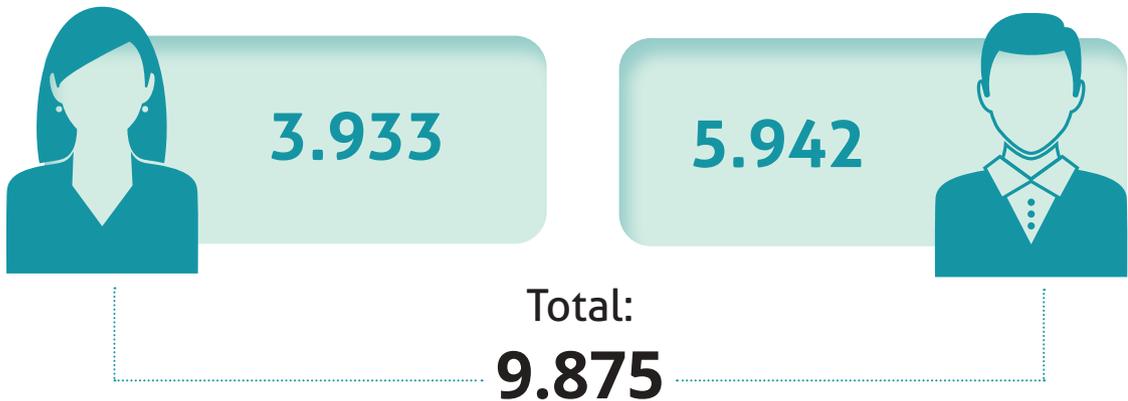
Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

BPK Perwakilan

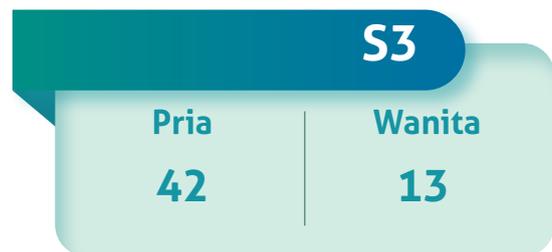
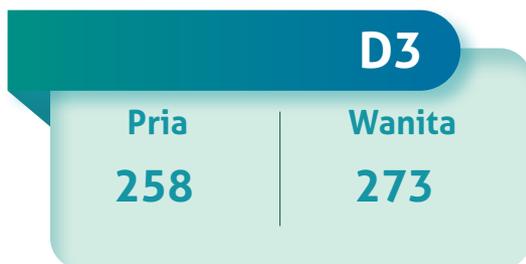
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, BUMD dan lembaga terkait pada lingkup tugas AKN V dan AKN V.



Data Pegawai Berdasarkan Gender



Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

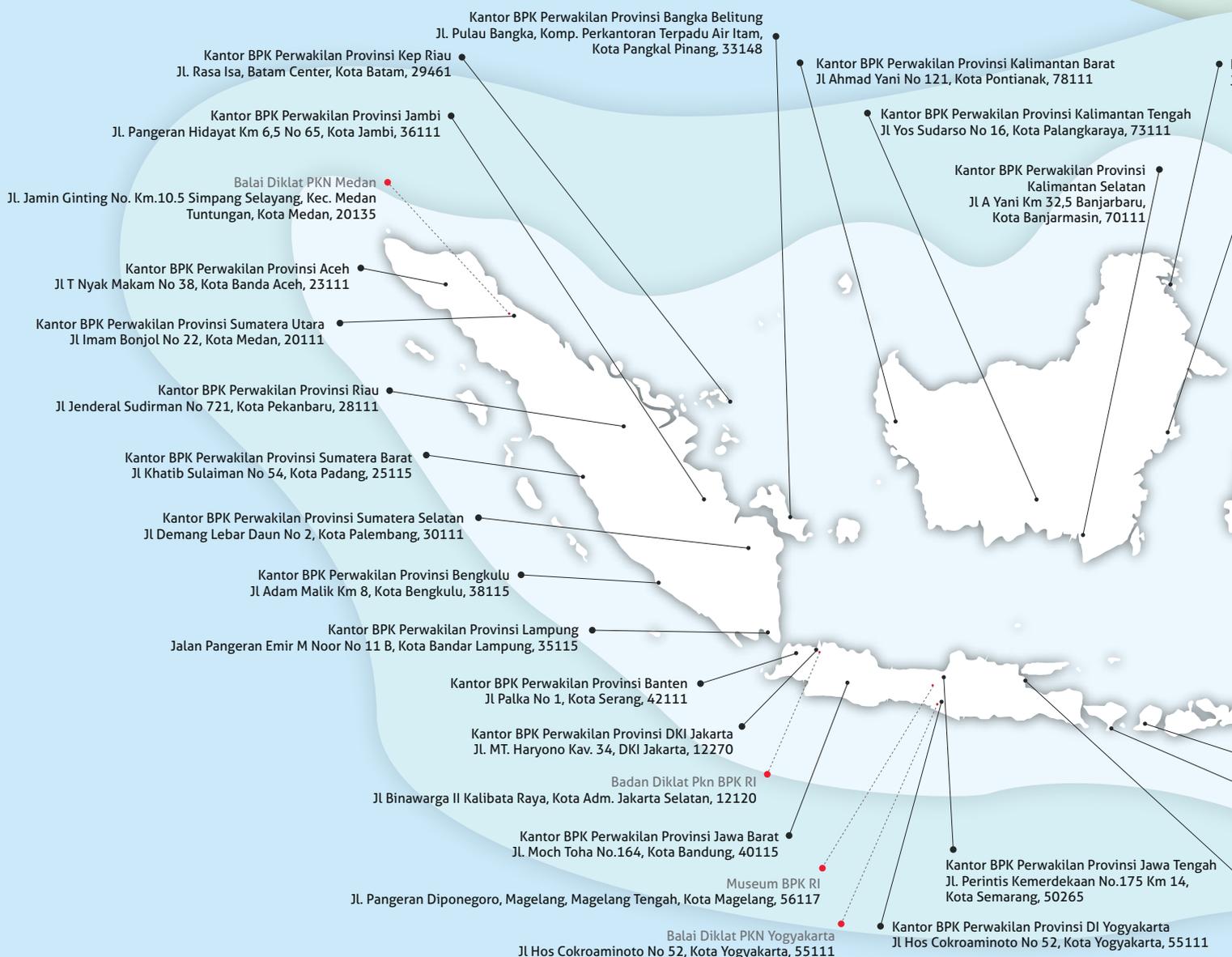


Data Jumlah Pegawai Perwakilan

Kantor Perwakilan	Pria	Wanita
BPK Perwakilan Provinsi Aceh	127	101
BPK Perwakilan Provinsi Bali	92	67
BPK Perwakilan Provinsi Banten	71	47
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	79	52
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	65	54
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	135	71
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	74	30
BPK Perwakilan Provinsi Jambi	90	57
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	129	82
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	181	117
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	168	125
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	99	52
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	82	62
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	84	68
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	88	53
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	61	33
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64	48
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	75	42
BPK Perwakilan Provinsi Lampung	96	76
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	91	38
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	72	42
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	88	60
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	132	89
BPK Perwakilan Provinsi Papua	156	86
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	89	49
BPK Perwakilan Provinsi Riau	95	85
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	79	33
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	121	114
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	106	53
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	126	75
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	101	81
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	115	82
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	127	119
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	153	115
Grand Total	3.511	2.358



Sebaran Kantor BPK



BPK RI MEMILIKI:

1 Kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia.

34 Kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi.

1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta.

4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No.98, Kota Tarakan, 77111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl Moh Yamin No 4, Kota Samarinda, 75111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endang, Rangas, Kab. Mamuju, 91512

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl Prof Moh Yamin No 84, Kota Palu, 94111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga No.3, Kota Gorontalo, 96123

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Jl 17 Agustus No 04, Kota Manado, 95111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, Kota Ternate, 97716

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua
Jl Balaikota No 2, Kota Jayapura, 99111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Jl Sowi Gunung No.3, Manokwari

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kota Ambon, 97232

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Saosao No.10, Kota Kendari, 93100

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl A Pettarani, Kota Makassar, 90222

Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT
Jl W.J. Lalamentik No.91, Oebobo, Kota Kupang, 58111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB
Jl Udayana No 22, Kota Mataram, 83111

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali
Jl DI Panjaitan No 2 Renon, Kota Denpasar, 80114

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jl Raya Juanda, Kab. Sidoarjo, 61211

Balai Diklat PKN Gowa
Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong, Somba Opu, Kabupaten Gowa, 92113

Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





BAGIAN 4

Tantangan BPK ke Depan



Tantangan BPK ke Depan

Berada di usia 76 tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencatatkan berbagai prestasi. Tak hanya di Indonesia, lembaga yang lahir pada 1 Januari ini juga berhasil mengangkat nama baik lembaga dan Indonesia di tingkat internasional.

Pada tahun ini, BPK terus memberikan hasil nyata terhadap upaya pembangunan bangsa yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang paling nyata adalah bahwa BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp132,69 triliun. Sekitar Rp19,20 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023.

Hasil ini berasal dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK sejak 2005 hingga semester I 2023. Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023. Dalam laporan itu disampaikan bahwa penyelamatan tersebut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Pada 2022, BPK juga memperoleh peringkat pertama di tingkat kementerian dan lembaga untuk penyerapan anggaran yang mencapai 99,65%. BPK juga telah menerima beragam penghargaan, antara lain di bidang pengelolaan keuangan, SDM, kehumasan, hingga penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BPK pun telah membangun Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK untuk pemetaan proses bisnis. Kemudian BPK General Office Automation (BPK GO) untuk integrasi dan kemudahan akses semua aplikasi di BPK. Lalu pengembangan Big Data Analytics (Bidics) untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui transformasi digital.

BPK juga mengalami momentum peningkatan kapasitas melalui kerja sama internasional. Misalnya, dengan menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai *new engagement group* G-20. Kemudian BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal untuk beberapa lembaga internasional, terutama yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa lembaga lembaga tersebut antara lain, Inter-Parliamentary Union untuk periode 2023-2025. Kemudian World Intellectual Property Organization (WIPO) periode 2024-2029. Selain itu, BPK juga memimpin Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2022-2023 pada November lalu.

BPK juga dipercaya menjadi pemeriksa eksternal International Maritime Organization selama dua periode (2020-2023, 2024-2027), termasuk World Maritime University dan International Maritime Law Institute, dan World Intellectual Property Organization (2024-2029).



BPK Satu, BPK Hebat

Capaian-capaian ini tentunya tidak boleh membuat BPK lengah. Karena, masih banyak tantangan-tantangan akan dihadapi dan harus dilalui pada masa mendatang.

Malah, dengan keberhasilan melalui tantangan itu, maka BPK menjadi organisasi yang terus bertumbuh, berbenah, dan bergerak maju. Dengan diuji oleh berbagai tantangan itu maka BPK dapat menjadi semakin dewasa dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia.

Ada beberapa hal yang sekiranya akan menjadi tantangan BPK ke depannya. Pertama adalah pemantapan dan penguatan internal. Terkait dengan hal ini, sangat penting bagi BPK untuk mengingat dan kembali menguatkan komitmen yang telah menjadi nilai-nilai dasar lembaga.

Hal ini pun sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun (HUT) BPK yang ke-76, yaitu "Makin Kuat Makin Hebat". Tema ini mencerminkan harapan seluruh insan BPK untuk menjadi semakin kuat dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan. Kemudian semakin hebat dengan memberikan karya terbaik dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menghadapi isu internalisasi, seluruh pegawai BPK juga harus meningkatkan *ownership*, komitmen, dan kontribusi nyata dalam implementasi rencana strategis (renstra). Untuk itu, efektivitas koordinasi dan kolaborasi antarunit dan satuan kerja yang telah dibangun selama ini harus terus ditingkatkan.

Tidak hanya itu, sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta lintas level pemerintahan juga harus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan transformasi pola pengelolaan program dan kegiatan pemerintah yang mengarah kepada konsep pengelolaan secara *whole of government*.

BPK harus siap menyesuaikan proses bisnisnya melalui peningkatan kolaborasi antarunit dan satuan kerja pemeriksaan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas kinerja pengelolaan program dan kegiatan pemerintah. Tak hanya itu, namun juga bermanfaat signifikan bagi para pemangku kepentingan.

“

Bapak dan Ibu jangan ada pemikiran atau perasaan tidak bertanggung jawab, jika terdapat pegawai pada satker Bapak dan Ibu yang melakukan pelanggaran integritas, hanya karena Bapak dan Ibu tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Ketua BPK Isma Yatun



Tanggung Jawab yang Sama

Saat ini, BPK masih mengalami tantangan serius dalam mengendalikan integritas dan meningkatkan budaya antikorupsi. Salah satu indikatornya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BPK tahun 2022 yang menurun dibandingkan skor SPI pada tahun 2021.

Pada kenyataannya, gangguan independensi dan integritas yang dihadapi oleh pemeriksa masih menjadi hal nyata yang terjadi dan cukup banyak ditemukan. Hal ini sesuai dengan hasil sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK dan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Utama (Itama) BPK tentang pelanggaran kode etik.

Karenanya, kepala perwakilan, pejabat struktural dan fungsional, serta pelaksana BPK penting untuk saling menjaga dan menguatkan penerapan nilai-nilai dasar BPK. Tidak hanya itu, para kepala perwakilan juga dapat terus mengawal pelaksanaan SPI pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga diharapkan skor SPI BPK dapat meningkat dan bersifat objektif. Dengan kata lain, terwujud di dalam pekerjaan sehari-hari yang sesuai dengan kondisi senyatanya.

Untuk itu, kita bersama perlu mengupayakan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi. Termasuk pemantauan secara berkala berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan.

Terkait dengan tantangan ini, dari sudut pandang pemangku kepentingan, pelaksana BPK juga perlu didorong untuk meningkatkan edukasi dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan. Terutama mengenai pemberian layanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.

Sebagai bentuk pengawasan, seluruh elemen BPK memiliki tanggung jawab yang sama. Jika kemudian terjadi pelanggaran integritas atau kecurangan di satuan kerja (satker), maka itu akan menjadi tanggung jawab kita semua. Hal ini karena komitmen akan penerapan dari nilai-nilai dasar BPK merupakan bagian yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas.

Terkait dengan internalisasi, tantangan lain yang dihadapi adalah soal pendanaan dan likuiditas. Apalagi, karena adanya situasi pasca-Covid-19, tekanan inflasi, dan mata rantai global yang terpengaruh oleh perang-perang yang terjadi di berbagai negara.

Karenanya, perlu adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik. Apalagi mengingat permasalahan pendanaan dan likuiditasnya merupakan masalah yang penting dan kompleks.

Memang, Pemerintah Indonesia merespons krisis Covid-19 dengan cepat. Misalnya saja dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Hal ini juga dilakukan dengan BPK yang juga merespons dengan cepat dengan menjalankan tiga peran penting, yaitu *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Belajar dari krisis-krisis masa lalu yang selalu menyisakan permasalahan hukum, yang dilakukan BPK pada awal pandemi Covid-19 adalah memberikan *insight* mengenai pengelolaan keuangan negara dalam menangani dan memitigasi risiko pandemi. Peran *insight* BPK ini menjadi masukan bagi pemerintah sebagai sistem peringatan dini.

BPK kemudian memainkan peran *oversight* dengan menerapkan pendekatan audit komprehensif berbasis risiko. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan penggunaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Karena tidak dapat memastikan bagaimana pandemi akan berkembang, ditambah dengan disrupsi teknologi, telah membawa Indonesia ke era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA). Dalam situasi ini, BPK menyusun *strategic foresight* yang bertajuk Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19 : Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (<https://foresight.bpk.go.id/>)

Dalam *strategic foresight* ini, BPK menggunakan perencanaan skenario untuk mengembangkan empat kemungkinan skenario masa depan, berdasarkan dua ketidakpastian mendasar. Yaitu respons pemerintah dalam menangani krisis dan tingkat keparahan pandemi.

Pada setiap skenario, BPK mengidentifikasi peluang, tantangan dan risiko yang berkaitan dengan aspek kesehatan, ekonomi, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi, yang dapat menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam mempersiapkan kebijakan untuk skenario terbaik.

“

Saat ini BPK telah memasuki tahun ke-4 atau satu setengah tahun lagi akan mengakhiri periode renstra 2020-2024. Untuk itu, raker kali ini menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama melihat kembali secara menyeluruh sejauh mana BPK telah mewujudkan visi dan misinya, serta apa saja yang masih harus ditingkatkan dalam satu setengah tahun ke depan.

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto



Pemeriksaan yang Memberikan Dampak

Tantangan selanjutnya terkait dengan *core business* BPK, yaitu pemeriksaan. Dengan berbagai perkembangan yang ada, maka BPK harus memastikan bahwa kualitas pemeriksaan tidak hanya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akan tetapi, juga mampu memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.

Untuk itu, BPK harus memastikan bahwa entitas dan lembaga perwakilan benar-benar menjalankan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Karena, untuk memberikan dampak, maka *output* yang dihasilkan lembaga pemeriksa melalui rekomendasi hasil pemeriksaan, harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.

Dalam mengoptimalkan dampak audit untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya ditentukan oleh sumber daya dan kapasitas yang dimiliki. Akan tetapi, ditentukan juga oleh aksesibilitas serta komunikasi dan interaksi yang optimal dengan pemangku kepentingan. Baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah.

Alasannya karena aksesibilitas atas hasil pemeriksaan BPK akan berdampak luas dalam meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini akhirnya akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, BPK harus berupaya menjalin hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan serta memastikan terealisasinya dampak pemeriksaan.

Hal ini, misalnya, dengan meningkatkan publikasi hasil pemeriksaan dan mendiskusikan hasil pemeriksaan BPK di ruang diskusi publik dengan masyarakat, para profesional, dan akademisi.

Keterlibatan publik dalam mendiskusikan hasil-hasil pemeriksaan BPK menjadi hal penting karena dapat membawa manfaat dan memberikan motivasi. Selain itu, juga sebagai tekanan positif bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara paripurna untuk Indonesia yang lebih baik.

BPK sebagai lembaga pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI), juga perlu menunjukkan relevansi berkelanjutan kepada masyarakat, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat dikelola dengan memberi respons atas tantangan dari masyarakat, harapan dari berbagai pemangku kepentingan, serta risiko yang muncul dan perubahan lingkungan tempat audit dilakukan.

Untuk menunjukkan kredibilitas demi perubahan yang bermanfaat, SAI juga harus memahami perkembangan sektor publik yang lebih luas. Tak hanya itu, namun juga terlibat dengan para pemangku kepentingan, khususnya terkait bagaimana SAI dapat melakukan perbaikan di sektor publik.

Hal ini sejalan dengan prinsip INTOSAI 12 yang menekankan bahwa SAI harus secara efektif berkomunikasi dan menunjukkan relevansi kepada masyarakat dengan melaporkan hasil audit sebagai pertanggungjawaban pemerintah. Dalam hal ini, BPK dapat mengelola hubungan

dengan pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Hubungan BPK dengan DPR sebagai pemangku kepentingan salah satunya diwujudkan melalui penyampaian ringkasan laporan hasil pemeriksaan setiap semester. BPK juga menyediakan platform yang disebut Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sebagai saluran komunikasi antara BPK dan kementerian atau lembaga yang diperiksa untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Mengingat keterlibatan masyarakat di era digital, BPK juga menyediakan saluran komunikasi *online* yang lebih mudah diakses dan lebih efisien. Salah satu contohnya adalah pusat informasi layanan online yang disebut E-PPID. Melalui layanan ini masyarakat dapat meminta informasi atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan BPK.

Terkait dengan penyusunan LKPP, LKKL, dan LKBUN, BPK melihat adanya sejumlah tantangan. Misalnya saja, pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang berlaku efektif untuk penyusunan LKPP, LKKL, dan LKBUN pada 2022.

Kemudian, penyaluran secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility* (TDF) atas dana bagi hasil (DBH) kepada pemerintah daerah. Lalu, penggabungan lima kementerian/lembaga menjadi BRIN pada 2022 dan penerapan seluruh modul Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) secara penuh untuk pertama kalinya di seluruh kementerian/lembaga.



Sistem Sakti patut diperhatikan karena mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN di instansi pemerintah. Ini yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjamin bahwa penggunaan sistem Sakti dalam proses penyusunan LKKL tidak akan mengurangi kualitas LKKL yang dihasilkan.

BPK juga menilai bahwa profesionalisme pemeriksa di lingkup sektor publik merupakan hal yang fundamental dan krusial. Terutama di era reformasi manajemen keuangan publik, atau *public finance management (PFM)* pada saat ini.

Komitmen profesionalisme merupakan langkah utama untuk meraih kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan diiringi harapan agar para pemeriksa senantiasa melayani kepentingan publik dan menghormati kepercayaan yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka BPK pun telah mengatur secara tegas dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Di situ dijelaskan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Menurut Ketua BPK, kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK menyelenggarakan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara yang dikenal dengan Certified State Finance Auditor (CSFA).

“

Seluruh pihak yang terlibat dalam siklus akuntabilitas keuangan publik harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara dan memastikan peningkatan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku.

Ketua BPK Isma Yaton



Digital dan Audit Berkualitas Tinggi

Transformasi digital dan upaya BPK dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi tantangan BPK selanjutnya. Pemeriksa, akan menghadapi berbagai isu dan tantangan di era digital. Meskipun begitu, pemeriksa tetap dituntut untuk menghasilkan audit berkualitas tinggi.

Pada saat yang sama, organisasi pemerintahan merupakan “prime target” dalam *cyber-attacks*. Karena sektor ini merupakan bagian terbesar dari pemilik data maupun informasi publik yang *secretive*, *sensitive*, dan *high value*.

Untuk itu, meningkatkan keamanan siber atau *cyber security* menjadi penting. Sehingga organisasi pemerintahan tetap waspada terhadap ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan berskala besar.

Setidaknya, ada tiga rencana strategis BPK yang harus dijalankan dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Pertama adalah implementasi proses bisnis digital. Kemudian, implementasi tata kelola teknologi informasi. Terakhir, implementasi Big Data Analytics (Bidics) sebagai platform implementasi *big data* yang dikembangkan oleh BPK secara *built-in-house*.

Bidics merupakan salah satu sarana diseminasi praktik analisis data untuk seluruh pegawai. Platform ini memiliki komponen yang terdiri atas (1) Bidics

Dashboard, (2) Bidics Self-Service Analytics, (3) Bidics Engine, (4) Bidics Development, dan (5) Bidics Knowledge Management.

Tak hanya itu, seiring dengan meningkatnya digitalisasi sistem pemerintahan dan *remote working*, perangkat pribadi yang digunakan pegawai juga cenderung tidak memiliki akses terhadap *IT security patches and updates*. Hal ini mengakibatkan sistem informasi pemerintahan rentan mengalami pelanggaran keamanan atau kejahatan siber (*cyber crime*).

Padahal, dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari *cyber crime* terbilang sangat besar. Baik dampak finansial maupun secara jangka panjang, seperti *reputational damage*.

Karenanya, cara terbaik bagi organisasi, termasuk BPK, adalah dengan menerapkan langkah-langkah pro aktif untuk memitigasi risiko. Termasuk menyiapkan *recovery plan* yang kokoh serta komprehensif untuk melindungi seluruh kepentingan *stakeholders*.

BPK pun menghimbau kepala perwakilan agar senantiasa menjaga keamanan saat terkoneksi ke jaringan kantor pusat. Ini membuat pegawai BPK haus dapat memahami pentingnya melindungi informasi sensitif. Begitu pula mampu mengidentifikasi potensi ancaman dan meresponsnya dengan tepat. Alasannya, perangkat TI pegawai menjadi titik krusial pengamanan jaringan dalam sistem informasi BPK yang sudah terintegrasi.



Internasional Sebagai Cermin Refleksi

Sebagai bagian dari komunitas global, BPK sebagai lembaga pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI) telah menjalankan peran yang luar biasa. Berbagai prestasi telah diraih BPK di tingkat dunia.

Di sisi lain, prestasi-prestasi ini juga menjadi tantangan karena harus dapat menjadi cermin bagi BPK untuk dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Memang, berkiblat ke dunia internasional bukan masalah wajib atau tidak. Akan tetapi, ini merupakan masalah sebuah kebutuhan untuk melakukan refleksi atas tampilan kinerja audit. Apakah sudah lengkap dan pantas apabila dibandingkan dengan standar internasional sebagai sebuah cermin praktik audit internasional terbaik.

Karenanya, BPK aktif dan terbukti sukses dalam berbagai ajang internasional. Misalnya saja, juga ikut memberikan dukungan dan kontribusi terhadap Presidensi G20 pada tahun 2022 dengan menginisiasi Supreme Audit Institution (SAI) 20. Ini merupakan *engagement group* (EG) yang dibentuk pada 2022 dalam periode Presidensi G20 Indonesia.

SAI20 Summit mengesahkan *rules of procedures* (RoP) atau aturan internal. KTT SAI20 juga mengesahkan 12 poin komunikasi (pernyataan

bersama) yang disampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 November 2022.

Ada dua isu prioritas utama yang diusung oleh KTT SAI20, yaitu mengakselerasi pemulihan ekonomi serta mendukung percepatan implementasi SDGs. Khususnya terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

BPK juga ditunjuk kembali menjadi pemeriksa eksternal IMO periode 2024-2027. Ini merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas BPK dipercaya untuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi internasional.

Penunjukan ini berlangsung dalam sidang Majelis IMO ke-33 yang digelar di kantor pusat IMO, London, Inggris pada Jumat (1/12/2023). Sekitar 175 negara anggota yang menghadiri sidang secara bulat memutuskan menunjuk kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO. Termasuk di dalamnya, World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) tahun 2024-2027.

Sebelumnya, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal IMO termasuk di dalamnya WMU dan IMLI pada periode 2020-2023.

Selama periode waktu tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme serta menerapkan standar tertinggi untuk menjaga kualitas audit. Selain itu, BPK juga telah memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas manajemen IMO.

Karenanya, penunjukan kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya. Yaitu di International Atomic Energy Agency (2016-2021), IMO (2020-2023) termasuk di dalamnya WMO dan IMLI, serta World Intellectual Property

Organization (2024-2029). Akhirnya, sekitar 175 negara anggota yang menghadiri sidang Majelis tersebut secara bulat memutuskan untuk menunjuk kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO.

Selain IMO, pada November 2023, BPK juga dipilih menjadi pemeriksa eksternal Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk periode 2023-2025. Dengan peran sebagai pemeriksa eksternal berbagai lembaga internasional tersebut, BPK dipercaya menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023). Pada hari yang sama, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan IMO pada Kategori C untuk periode 2024-2025. Kedua prestasi ini semakin mengukuhkan posisi dan eksistensi Indonesia di dunia internasional.

“

Laporan keuangan IMO tahun 2021 dan 2022 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dan BPK mengapresiasi IMO yang telah secara efektif merencanakan program kerja sama teknis terpadu dan mengembangkan inisiatif dalam mencegah kecurangan pendaftaran kapal serta menangani masalah penelantaran awak kapal.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana



Dengan terpilihnya BPK menjadi pemeriksa eksternal IPU, BPK akan segera menjalankan mandat tersebut dan menggantikan pemeriksa eksternal sebelumnya, yaitu Comptroller and Auditor General of India (CAG India). Hal ini juga semakin meningkatkan kapasitas dan kredibilitas serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK.

Penunjukan BPK menjadi pemeriksa eksternal IPU berawal dari informasi kesempatan menjadi pemeriksa eksternal IPU. Berdasarkan informasi tersebut, BPK mengajukan proposal pencalonan sebagai kandidat pemeriksa eksternal IPU.

Seperti IMP, pengajuan proposal sebagai pemeriksa eksternal IPU dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya.

IPU adalah organisasi internasional yang menaungi parlemen di negara-negara anggota yang didirikan pada 1889 di Paris, Prancis. Saat ini, IPU yang memiliki 179 negara anggota berkantor pusat di Geneva, Swiss, serta memiliki kantor tetap di New York, Amerika Serikat, dan Vienna, Austria.

Organisasi ini memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan dialog antarpemerintah. Visi IPU adalah mewujudkan dunia sebagai tempat setiap suara dihitung, demokrasi, dan parlemen untuk pelayanan rakyat. Terutama untuk perdamaian dan pembangunan.

Sedangkan misinya antara lain adalah mempromosikan tata kelola demokratis, lembaga dan nilai-nilai. Kemudian bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk mengartikulasikan dan merespons kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Eksistensi IPU mendapat pengakuan penting dari organisasi PBB dengan pemberian status *observer* pada 2002. IPU pun memiliki hak khusus yang sangat luar biasa, yaitu dapat menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan Majelis Umum PBB.

Eksistensi BPK di dunia juga semakin diakui dengan penunjukan sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa Sedunia atau International Conference of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada tahun 2028. Pengajuan tersebut disepakati dalam pertemuan ke-59 organisasi lembaga pemeriksa se-Asia (ASOSAI) Governing Board di Busan, Korea Selatan, 20-22 September 2023.

Dengan diajukannya Indonesia sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, maka Badan Pemeriksa Keuangan akan ditetapkan sebagai Ketua Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa (INTOSAI) periode 2028-2031. Penetapan tersebut akan dilaksanakan pada INCOSAI XXV tahun 2025 di Kairo, Mesir.

INCOSAI merupakan perhelatan terbesar INTOSAI yang diselenggarakan setiap tiga tahun dan dihadiri anggotanya. Kegiatan ini menandakan pergantian kepemimpinan INTOSAI, di mana tuan rumah penyelenggara INCOSAI dinobatkan menjadi Ketua INTOSAI periode selanjutnya.



Ekonomi Hijau

Di dunia internasional, BPK juga memperlihatkan sikap terkait dengan adanya pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau (*green economy*) sangat penting untuk pelestarian lingkungan, kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian memberikan keamanan energi dan menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.

Terkait itu, SAI dapat berperan dalam mempromosikan ekonomi hijau dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien. Lalu harus transparan, akuntabel, dan efektif di seluruh inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, SAI dapat mengukur kinerja dan hasil program dan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau. Selanjutnya menilai apakah inisiatif tersebut mencapai tujuan lingkungan dan ekonominya serta melaporkan temuan serta membuat rekomendasi kepada lembaga pemerintah dan pembuat kebijakan. Dengan begitu dapat meningkatkan desain dan implementasi lingkungan hidup dan keberlanjutan program.

Bagi BPK, ekonomi hijau merupakan aspek penting dalam kerangka SDGs yang lebih luas. Pertumbuhannya pun didorong oleh investasi publik dan swasta. Khususnya dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan kerugian keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau memerlukan peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air. Hal ini sangat penting untuk pelestarian lingkungan, kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan keamanan energi dan menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.

Untuk mendorong dan mengawal penerapan ekonomi hijau di tingkat global, BPK pun menggelar seminar internasional bertajuk "Memanfaatkan Dampak Audit Kinerja menuju Ekonomi Hijau: Multi-Perspektif Regional, Nasional, dan Internasional" di Jakarta, 5-7 Juni 2023.



Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menegaskan bahwa ekonomi hijau adalah salah satu aspek signifikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menciptakan fokus baru pada ekonomi, dan memberi perhatian pada hasil sosial dan lingkungan yang positif.

Sebagai bagian dari masyarakat global, lembaga pemeriksa keuangan (Supreme Audit Institutions/SAI) memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian SDGs melalui audit program pemerintah yang relevan.

Seminar ini digelar agar peserta dapat memperoleh kesamaan perspektif dan pemahaman tentang bagaimana audit kinerja mempengaruhi masyarakat yang lebih baik dengan dampak yang positif dan signifikan, terutama dalam ekonomi hijau.

Komitmen BPK terhadap perkembangan ekonomi hijau maupun SDGs juga ditunjukkan dengan menggelar pelatihan internasional mengenai Audit SDGs dengan fokus transisi energi sebagai

bagian *Green Economy*, di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Bali pada 27 November sampai dengan 1 Desember 2023.

Pelatihan ini diikuti 28 peserta yang berasal dari 12 negara, antara lain, Brazil, China, India, Irak, Kuwait, Arab Saudi. Para peserta merupakan auditor di SAI negara masing-masing.

BPK RI menyelenggarakan pelatihan ini sebagai platform peningkatan kapasitas, membantu komunitas SAI meningkatkan kemampuan audit dalam konteks transisi energi, dengan harapan dapat berkontribusi dalam membangun komunitas auditor yang lebih kuat.

Penyelenggaraan pelatihan internasional ini menunjukkan BPK RI memegang peranan penting sebagai *role model* dalam pemeriksaan transisi energi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI tentang audit lingkungan, energi terbarukan, dan perubahan iklim menjadi bahan rujukan dan masukan bagi dunia internasional melalui SAI negara lain.



**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000,
Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id